



**PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG**

Laporan Kinerja Tahunan (LKj) Tahun 2025



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 tahun 2020, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur, Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 5 (lima) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan 13 program dengan 3 (tiga) sasaran strategis sehingga laporan kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian sasaran program yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2025 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 serta Tahun 2025-2029. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tanjung Pandan, 20 Februari 2026


KEPALA DINAS,
OSKAR YULANDA, ST., MT
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 200112 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi	2
1.2 Struktur Organisasi.....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	11
1.4 Sistematika Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Target Kinerja Tahun 2025	14
2.1.1 Periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026	14
2.1.2 Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
2.2.1 Periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026	17
2.2.2 Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	20
B. Kinerja Lainnya Tahun 2025	92
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	96
BAB IV PENUTUP.....	108
4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2025	108
4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	109
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR Kabupaten Belitung	12
Tabel 2.1	Target Kinerja dan Indikator Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	15
Tabel 2.2	Target Kinerja dan Indikator Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja 2025	17
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Induk Tahun 2025	17
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja 2025	18
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 3.2	Ringkasan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026	22
Tabel 3.3	Ringkasan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	23
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029	25
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1	27
Tabel 3.6	Realisasi Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman Tahun 2025	28
Tabel 3.7	Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024-2025	28
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	29
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target / Standar Provinsi / Nasional / Internasional	30
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2	30
Tabel 3.11	Realisasi Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2025	31
Tabel 3.12	Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024-2025	33
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	34



Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target / Standar Provinsi / Nasional / Internasional	34
Tabel 3.15	Target, Ralisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	36
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3	43
Tabel 3.17	Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2025	43
Tabel 3.18	Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024-2025	44
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	45
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target / Standar Provinsi / Nasional / Internasional	45
Tabel 3.21	Target, Ralisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman	47
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1	49
Tabel 3.23	Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman Tahun 2025	50
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	51
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target / Standar Provinsi / Nasional / Internasional	51
Tabel 3.26	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2	53
Tabel 3.28	Realisasi Indeks Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2025	54
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	60
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target / Standar Provinsi / Nasional / Internasional	60
Tabel 3.31	Target, Ralisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Indeks Infrastruktur ke-PU-an	61
Tabel 3.32	Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kab. Belitung Tahun 2025	67
Tabel 3.33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3	81
Tabel 3.35	Realisasi Indeks Infrastruktur Permukiman Tahun 2025	81
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	84

Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target / Standar Provinsi / Nasional / Internasional	84
Tabel 3.38	Target, Ralisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Indeks Infrastruktur Permukiman	85
Tabel 3.39	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	89
Tabel 3.40	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	92
Tabel 3.41	Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP	94
Tabel 3.42	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran IKU	97
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program	97
Tabel 3.44	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025 Menurut Kegiatan / Sub Kegiatan	99
Tabel 3.45	Perbandingan Realisasi Anggaran	102
Tabel 3.46	Kinerja Sumber Daya Manusia	104
Tabel 3.47	Perbandingan Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	104
Tabel 3.48	Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas PUPR Kabupaten Belitung	106

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung	4
Grafik 3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung	26
Grafik 3.2	Kinerja Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	29
Grafik 3.3	Capaian Kinerja Nilai Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	34
Grafik 3.4	Kinerja Pemenuhan PSU Permukiman	45
Grafik 3.5	Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kab. Belitung	105
Grafik 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi	106
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.....	65
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	66
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan UPT PAM	68
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	70
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	71
Gambar 3.7	Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	73
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	75
Gambar 3.9	Dokumentasi Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ...	77
Gambar 3.10	Dokumentasi Pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi	79
Gambar 3.11	Dokumentasi Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	88



Gambar 3.12 Dokumentasi Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	91
Gambar 3.13 Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Kearsipan	93
Gambar 3.14 Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Program GENTING	94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain jalan dan jembatan, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan permukiman. Dari output pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 merupakan tahun transisi yaitu laporan kinerja yang merupakan tahun kedua Renstra Tahun 2024-2026 serta tahun pertama Renstra Tahun 2025-2029 untuk pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar 56,993 Milyar untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman. Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 adalah pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman, pemenuhan infrastruktur ke-PU-an serta pemenuhan PSU permukiman, sementara sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman, indeks infrastruktur ke-PU-an serta indeks infrastruktur permukiman. Hal tersebut didukung melalui pelaksanaan 14 program, 26 kegiatan serta 72 sub kegiatan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut:

A. Rencana strategis Tahun 2024-2026

1. Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman dengan realisasi 46,32% dan Kinerja 99,51%;
2. Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an, dengan realisasi 25,65% dan kinerja 93,04%;
3. Pemenuhan PSU Permukiman, dengan realisasi 66,99% dan kinerja 102,21%.



B. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

1. Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman dengan realisasi 44,87% dan kinerja 100,31%;
2. Indeks Infrastruktur ke-PU-an dengan realisasi 42,03% dan kinerja 100,17%;
3. Indeks Infrastruktur Permukiman dengan realisasi 56,26% dan kinerja 100,73%.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja adalah adanya komitmen pimpinan OPD serta seluruh personil dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja serta adanya dukungan pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Adapun faktor penghambat adalah sumber daya manusia yang terbatas dengan banyaknya kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung serta terkait dengan pemenuhan infrastruktur ke-PU-an yang tidak mendapatkan anggaran seperti pembangunan jalan menuju jalan standar yang merupakan salah satu faktor untuk pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Untuk rencana ke depan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada melalui komitmen baik dalam perencanaan pelaksanaan dan monitoring pekerjaan serta kiranya Pemerintah Kabupaten Belitung dapat mengalokasikan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. secara umum bertujuan Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah, menilai pelaksanaan program unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta memberikan informasi kinerja organisasi unit kerja. Secara khusus bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap penerapan sistem guna peningkatan kinerja organisasi. Dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pasal 21 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan OPD disampaikan oleh kepala OPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut disusun dokumen perencanaan Lima tahunan (Renstra) dan Tahunan (Renja), sebagai upaya memenuhi Standar Pelayanan yang diamanatkan, ataupun target Kinerja yang harus diukur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tahun 2025 merupakan tahun transisi, dimana untuk anggaran induk masih mengacu kepada Rencana strategis Tahun 2024-2026 sedangkan untuk anggaran perubahan sudah mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, setelah dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan umum. Sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan secara periodik, dijabarkan dalam dokumen perencanaan Tahunan (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan instansi pemerintah harus akuntabel, sistematis,

terukur dan berkesinambungan. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila organisasi memiliki suatu sistem perencanaan yang baik, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana kerja tahunan, penyusunan dan penetapan anggaran sampai pada pengukuran pencapaian kinerja.

1.1 Tugas dan Fungsi

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas serta fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah.

Fungsi :

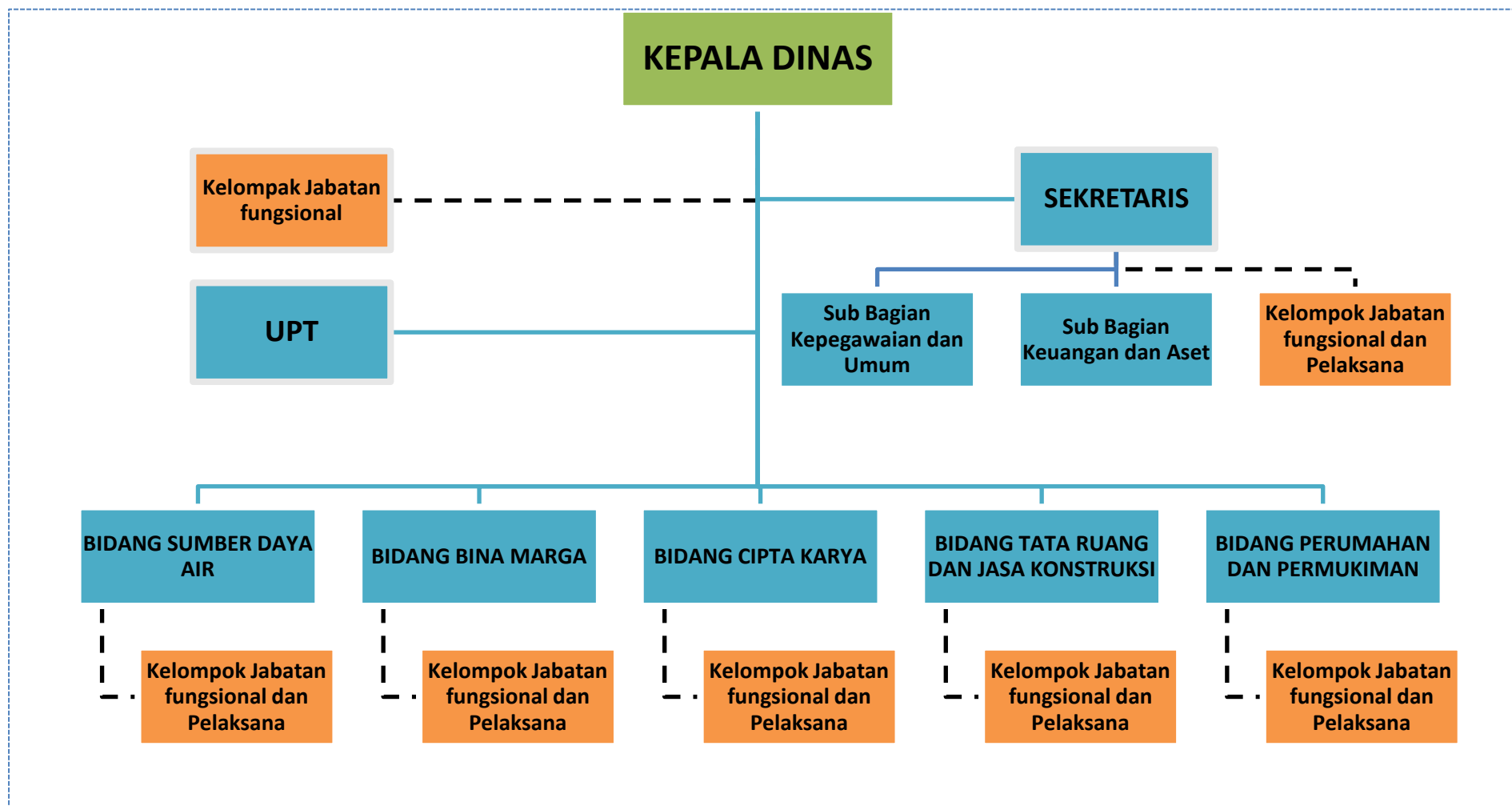
1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (Gambar 1.1)

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung



Penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air;
- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang sumber daya air;

- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang bina marga;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang bina marga;
- g. penyusunan penerbitan izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- h. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang cipta karya;
- b. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang cipta karya;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman
- b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
- c. Pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pertamanan di daerah;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana dengan penyediaan infrastruktur pada permukiman;

- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang perumahan dan permukiman;
- h. penyusunan penerbitan izin terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. Pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- h. pemberian izin dan/atau rekomendasi terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai 2 (dua) UPT yaitu:

a. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium

UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum

UPT Pengelolaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang Pengelolaan Air Minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung, melakukan pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi air minum dan air bersih yang didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT Pengelolaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Pengelolaan Air Minum;
- b. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Pengelolaan Air Minum beserta sarana prasarana pendukungnya;

- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi air minum dan air bersih unit Pengelolaan Air Minum yang di distribusikan kepada para pelanggan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Pengelolaan Air Minum;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis merupakan hasil analisis terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, Hasil telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR Kabupaten Belitung

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketersediaan dan layanan infrastruktur wilayah yang Belum optimal	Belum optimalnya infrastruktur ke-PU-an	• Pengelolaan sumber daya air Belum optimal • Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi • Belum optimalnya pelayanan jalan kabupaten • Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang • Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung • Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi
		Belum optimalnya infrastruktur permukiman	• Belum optimalnya sarana dan prasarana umum permukiman • Berkembangnya Kawasan kumuh perkotaan • Masih banyaknya pengembang perumahan yang Belum menyerahkan PSU perumahan

Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air;
- b. Pemenuhan Standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi;
- c. Mengoptimalkan pelayanan jalan kabupaten;
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan gedung;
- e. Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi dan mutu konstruksi;
- f. Mengoptimalkan Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang belum optimal;
- g. Pencegahan terhadap berkembangnya kawasan kumuh perkotaan.

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Tugas dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi
- 1.4. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Target Kinerja Tahun 2025
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
- 3.2. Kinerja Lainnya Tahun 2025
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025
 - 3.3.1. Anggaran Berdasarkan Sasaran
 - 3.3.2. Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 3.3.4. Realisasi Pendapatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2025
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Target Kinerja Tahun 2025

2.1.1. Periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung difokus pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisiensi dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan serta kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Belitung.

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung guna mendukung tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan yaitu **Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang**.

Adapun sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an.
- b. Meningkatnya infrastruktur permukiman.

Target Kinerja dan Indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Periode 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Target Kinerja dan Indikator Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang		Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman	45,34 %	46,55 %	47,96 %
	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	26,17 %	27,57 %	29,36 %
	Meningkatnya infrastruktur permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52 %	65,54 %	66,56 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

2.1.2. Periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung difokus pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisiensi dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan serta kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Belitung.

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung guna mendukung tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan yaitu **Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan.**

Adapun sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai adalah:

- c. Meningkatkan infrastruktur ke-PU-an.
- d. Meningkatkan infrastruktur permukiman.

Target Kinerja dan Indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Periode 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Target Kinerja dan Indikator Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	44,73 %	53,02 %	55,31 %	57,68 %	60,32 %	62,78 %
	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	41,96 %	50,38 %	51,83 %	53,21 %	54,94 %	56,45 %
	Meningkatnya infrastruktur permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	55,85 %	63,58 %	69,26 %	75,55 %	81,84 %	88,07 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dimana Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan Bupati sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagai penerima amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk perjanjian kinerja tahun 2025 terjadi transisi atau perubahan, dimana untuk perjanjian kinerja awal tahun 2025 acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sementara untuk perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

2.2.1. Periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Perjanjian kinerja induk tahun 2025 mengacu ke Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dimana periode tersebut merupakan periode masa transisi pada masa pemilihan kepala daerah, sehingga periode rencananya selama 3 (tiga) tahun perencanaan.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	46,55 %
2	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	27,57 %
3	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	65,54 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didukung oleh pendanaan APBD yang telah dijabarkan dalam DPA Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Induk Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.981.892.113	APBD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.939.653.220	APBD/DIF/DAK
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	680.000.000	DIF
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	604.422.041	APBD/DIF
5	Program Penataan Bangunan Gedung	6.700.361.300	APBD

6	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	198.747.223	APBD
7	Program Pengembangan Perumahan	93.472.500	APBD
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	468.133.930	APBD/DIF
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.058.909.678	APBD/DIF
10	Program Penyelenggaraan Jalan	15.518.651.660	APBD/DIF/DBH/PKB
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.420.061.820	APBD/DIF
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	141.176.820	APBD
13	Program Kawasan Permukiman	123.268.375	APBD
Total		50.203.888.178,00	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

2.2.2. Periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 mengacu ke Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, dimana periode tersebut merupakan periode masa awal dari kepala daerah hasil pemilihan umum.

Tabel 2.5. Perubahan Perjanjian Kinerja 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	44,73 %
2	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	41,96 %
3	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	55,85 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan didukung oleh pendanaan APBD yang telah dijabarkan

dalam DPPA Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.981.892.113	APBD-P
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.982.335.020	APBD-P /DIF/DAK
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	645.000.000	DIF
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	558.502.041	APBD-P /DIF
5	Program Penataan Bangunan Gedung	7.979.122.300	APBD-P
6	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	155.124.163	APBD-P
7	Program Pengembangan Perumahan	93.472.500	APBD-P
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	468.133.930	APBD-P /DIF
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.059.141.421	APBD-P /DIF
10	Program Penyelenggaraan Jalan	18.604.651.660	APBD-P /DIF/DBH/PKB
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.781.050.615	APBD-P /DIF
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	88.985.680	APBD-P
13	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	520.000.000	APBD-P
14	Program Kawasan Permukiman	75.494.601	APBD-P
	Total	56.992.906.044,00	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, telah ditetapkan bahwa sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah :

1. Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang;
2. Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an;
3. Meningkatnya Infrastruktur Permukiman.

Sementara berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang;
2. Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an;
3. Meningkatnya Infrastruktur Permukiman.

Sasaran tersebut diatas terkait erat dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Selanjutnya dari sasaran diatas, telah dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan. Sebagai konsekuensinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung telah menjabarkan dalam rencana anggaran tahun 2025.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	95 s.d. 100	Baik Sekali
2.	70 s.d. < 95	Baik
3.	55 s.d. < 70	Cukup
4.	< 55	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 dengan realisasinya.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM), Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
--	---	---

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung atas sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja, menunjukkan bahwa indikator kinerja pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman (46,86%) telah melebihi target yang ditetapkan, indikator kinerja pemenuhan infrastruktur ke-PU-an (26,19%) meningkat dari tahun lalu tetapi belum mencapai target, dan indikator kinerja pemenuhan PSU permukiman (67,54%) telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Ringkasan capaian kinerja

masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Ringkasan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	Persen	46,55	46,32	99,51	Baik Sekali
2	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	Persen	27,57	25,65	92,93	Baik
3	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen	65,54	66,99	102,21	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana tabel diatas adalah indikator kinerja hasil dari pembahasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disesuaikan dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk periode Tahun 2024-2026. Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan III sesuai dengan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk periode Tahun 2024-2026. Sasaran rencana strategis yang pertama adalah terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang dengan indikator kinerja utamanya adalah pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman merupakan tujuan dari indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, sedangkan sasaran rencana strategis yang kedua adalah meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan indikator kinerja utama adalah pemenuhan infrastruktur ke-PU-an, begitu pula dengan sasaran rencana strategis yang ketiga yaitu pemenuhan infrastruktur permukiman dengan indikator kinerja utama adalah pemenuhan PSU permukiman.

Tabel 3.3. Ringkasan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman	Persen	44,73	44,87	100,31	Baik Sekali
2	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	Persen	41,96	42,03	100,17	Baik Sekali
3	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen	55,85	56,26	100,73	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana tabel diatas adalah indikator kinerja hasil dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dalam Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk periode Tahun 2025-2029. Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV sesuai dengan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk periode Tahun 2025-2029. Sasaran rencana strategis yang pertama adalah tersedianya layanan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dengan indikator kinerja utamanya adalah indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman merupakan tujuan dari indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, sedangkan sasaran rencana strategis yang kedua adalah meningkatnya infrastruktur ke-PU-an merupakan sasaran rencana strategis yang pertama dengan indikator kinerja utama adalah indeks infrastruktur ke-PU-an, begitu pula dengan sasaran rencana strategis yang ketiga yaitu pemenuhan infrastruktur permukiman merupakan sasaran rencana strategis yang kedua dengan indikator kinerja utama adalah indeks infrastruktur permukiman.

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2025 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam menjalankan fungsi utamanya untuk urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan Kawasan permukiman pada pemerintah Kabupaten Belitung. Berikut realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk 2 periode renstra.

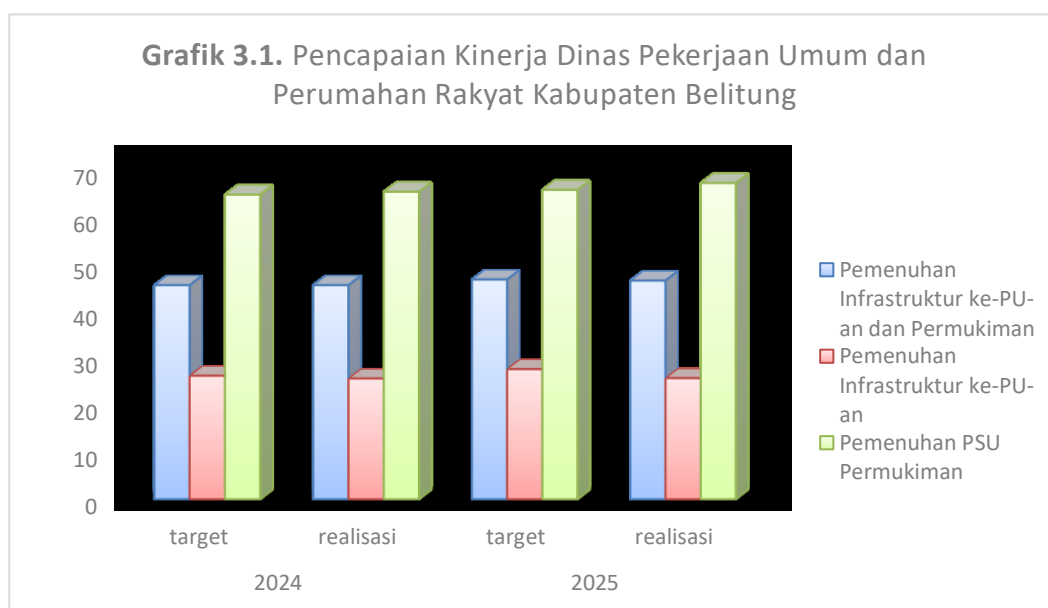


Tabel 3.4. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA TAHUN 2024-2026								RENSTRA TAHUN 2025-2029				
			TAHUN 2024			TAHUN 2025			TERGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN (%)	TAHUN 2025			TERGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
RENSTRA TAHUN 2024-2026															
	TUJUAN														
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	45,34	45,35	100,02	46,55	46,32	99,51	47,96	95,58					
	SASARAN														
1	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	26,17	25,57	97,71	27,57	25,65	92,93	29,36	87,36					
2	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52	65,14	100,96	65,54	66,99	102,21	66,56	100,65					
	RENSTRA TAHUN 2025-2029														
	TUJUAN														
1	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman									44,73	44,87	100,31	60,32	74,39
	SASARAN														
1	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an									41,96	42,03	100,17	54,94	76,50
2	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman									55,85	56,26	100,73	81,84	68,74



Perkembangan realisasi capaian untuk Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 triwulan III adalah sebagai berikut.



2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana strategis Tahun 2024-2026

Untuk penacapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Berikut penjelasan untuk setiap pencapaian setiap sasaran strategis.

2.1.1. Sasaran Strategis/IKU 1 : Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang

Sasaran strategis ini merupakan tujuan dari indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Target dan realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	Persen	46,55%	46,32%	99,51	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Pencapaian sasaran strategis 1 : Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Nilai Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman.

Uraian kinerja atas indikator kinerja Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang sebagai berikut:

2.1.1.1 Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman

Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang berarti tersedianya dan berfungsinya infrastruktur di suatu wilayah yang lokasi, jenis, kapasitas, dan pemanfaatannya selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pembangunan yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman adalah upaya penyediaan, pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana dasar yang menjadi tanggung jawab sektor Pekerjaan Umum dan permukiman guna mendukung kehidupan masyarakat yang aman, layak, dan berkelanjutan. Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat.

Target kinerja pada tahun 2025 untuk indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman sebesar 46,55%.

Pada Tahun 2025, indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman yang terealisasi sebesar 46,32% atau mencapai 99,51% dari target tahun 2025, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	46,55%	46,32%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dan permukiman dengan capaian sebesar 46,32% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman = $(0,5 \times \text{pemenuhan infrastruktur ke-PU-an}) + (0,5 \times \text{pemenuhan PSU permukiman})$.

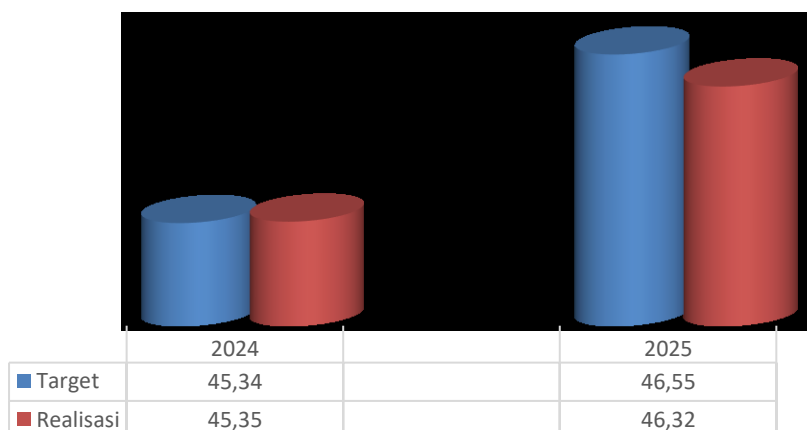
Perkembangan realisasi capaian untuk nilai pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 triwulan III adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. Perkembangan Indikator Kinerja Sasaran Startegis 1 Tahun 2024-2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	46,55%	46,32%	45,35%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Grafik 3.2. Kinerja Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman



Pencapaian realisasi target untuk pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman Tahun 2025 adalah sebesar 46,32% dari target sebesar 46,55%, dimana realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan dari Tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 45,35%. Hal ini disebabkan adanya pencapaian yang cukup signifikan dari pemenuhan PSU Permukiman, yang sampai triwulan III untuk sebagian kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sudah selesai dilaksanakan.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 serta target Provinsi / Nasional / Internasional.

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	47,96	46,32%	96,58

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target/Standar Provinsi/Nasional/Internasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Provinsi / Nasional/Internasional	Realisasi 2025	%
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	-	46,32%	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran dari pusat;
- 2) Adanya indikator yang mendukung pencapaian tidak tercapai;
- 3) Perhitungan realisasi sampai dengan triwulan III, dimana kegiatan banyak yang Belum selesai pelaksanaannya;
- 4) Ketidakselarasan antara perencanaan dan dokumen anggaran.

2.1.1.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang, efiesensi penggunaan sumber daya tidak dapat dianalisis dikarenakan realisasi yang dicapai masih dibawah target yang telah ditentukan.

2.1.2 Sasaran Strategis/IKU 2 : Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

Sasaran staregis ini merupakan sasaran dari indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut disampaikan target dan realisasi untuk kinerja pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada Tahun 2025.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an	Persen	27,57%	25,65%	92,93	Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Pencapaian sasaran strategis 2 : Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Nilai Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an.

Uraian kinerja atas indikator kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut:

2.1.2.1 Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an

Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dengan target kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 27,57%. Pada Tahun 2025, nilai pemenuhan infrastruktur ke-PU-an yang terealisasi sebesar 25,65% atau mencapai 92,93% dari target Tahun 2025, dengan ringkasana sebagaimana tersaji pada Tabel 3.8.

Tabel 3.11. Realisasi Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an	27,57%	25,65%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan capaian sebesar 25,65% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an = $(0,25 \times \text{jalan standar kabupaten}) + (0,25 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman}) + (0,25 \times \text{rumah dengan layanan SPALD}) + (0,25 \times \text{sumber daya air yang terkelola dengan baik})$

Keterangan :

- Persentase jalan standar = $(\text{Panjang jalan Standar kabupaten} / \text{Panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$
- Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman = $(\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman} / \text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung}) \times 100\%$
- Persentase rumah dengan layanan SPALD = $(\text{Jumlah rumah dengan SPALD} / \text{Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung}) \times 100\%$
- Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik = $(0,4 \times \text{Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur} + (0,6 \times \text{Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur}))$

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2025 adalah sebesar **25,65%**. Tingkat capaian kinerja sebesar **92,93%**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Jalan Standar didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan standar kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$$

$$\frac{183,18}{666,02} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar **27,50%** dengan perhitungan Panjang jalan standar kabupaten sebesar **183,18 km** dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yaitu **666,02 km** dikali seratus persen.

b. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{11.431}{61.297} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar **18,65 %** dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar **11.431 rumah tangga** dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu **61.297 rumah tangga** dikali seratus persen.

- c. Persentase rumah dengan layanan SPALD didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah rumah dengan SPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{2.935}{38.153} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah dengan layanan SPALD adalah sebesar **7,69 %** dengan perhitungan jumlah rumah dengan SPALD sebesar **2.935 rumah** dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Belitung yaitu **38.153 rumah** dikali seratus persen.

- d. Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik didapat dengan menggunakan rumus

$$(0,4 \times \text{Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur} + (0,6 \times \text{Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur}))$$

$$= (0,4 \times 55,82\%) + (0,6 \times 44,04\%)$$

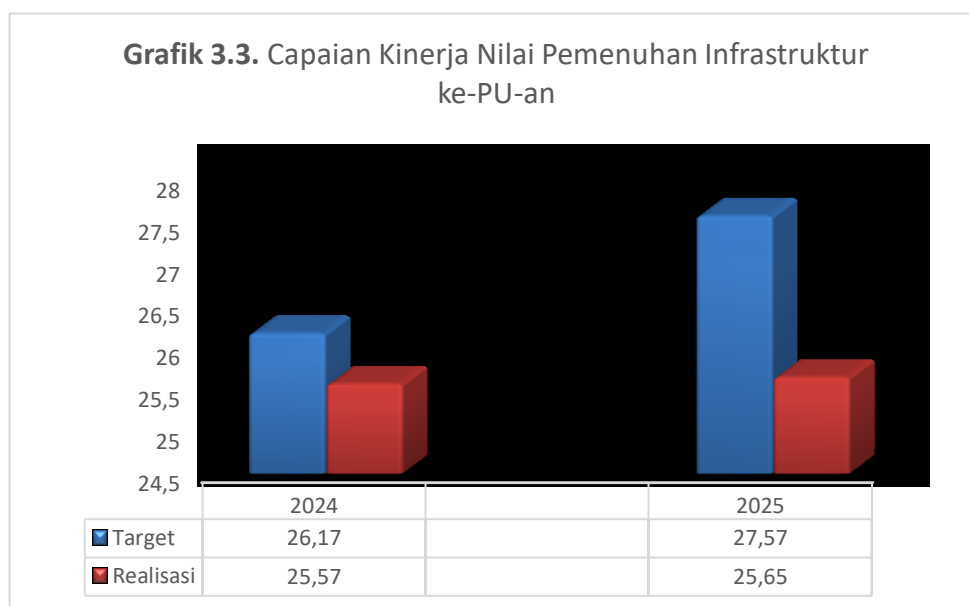
$$= 48,75\%$$

Realisasi Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik adalah sebesar **48,75%** dengan perhitungan 40% Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur dan 60% Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur.

Tabel 3.12. Perkembangan indikator kinerja Sasaran Startegis 2 Tahun 2024-2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an	27,57%	25,65%	25,57%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026



Pencapaian realisasi target Tahun 2025 adalah sebesar 25,65% dari target yang ditetapkan sebesar 27,57%, yang berarti bahwa target tidak tercapai akan tetapi apabila dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2024 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan indikator yang mendukung pencapaian kinerja pemenuhan infrastruktur ke-PU-an tidak teranggarkan dikarenakan keterbatasan anggaran, dimana untuk anggaran yang diperlukan cukup besar sementara pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran yaitu untuk komponen jalan standar kabupaten.

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an	29,36%	25,65%	87,36%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target/Standar Provinsi/Nasional/Internasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Provinsi / Nasional/Internasional	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an	-	25,65%	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025.
- 2) Melakukan kordinasi dengan OPD lain, PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung serta BPIW Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah terutama untuk infrastruktur ke-PU-an.
- 3) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- 1) Belum selesainya kegiatan yang dilaksanakan untuk Tahun 2025 karena penilaian dilakukan sampai dengan Triwulan III;
- 2) Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait dapat menyebabkan kinerja infrastruktur tidak optimal dan tidak terintegrasi;
- 3) keterbatasan anggaran untuk mendukung terhadap ketercapaian indikator kinerja dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten;
- 4) Keterbatasan sumber daya manusia dengan kegiatan yang sangat banyak menyebabkan beban yang sangat tinggi;
- 5) Ketidakselarasan antara perencanaan dan dokumen anggaran.

Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) program utama yaitu program pengelolaan sumber daya air, program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah serta 4 (empat) program pendukung yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, program pengembangan jasa konstruksi dan program penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an merupakan sasaran strategis tahun kedua untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 3.15. Target, Realisasi dan Capaian
Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Standar Kabupaten	29,00 %	27,50 %	94,83	Baik
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	52,82 %	48,75 %	92,29	Baik
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	19,75 %	18,65 %	94,43	Baik
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik	8,69 %	7,69 %	88,49	Baik
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	29,59 %	21,54 %	72,79	Baik
6	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar	5,22 %	4,58 %	87,74	Baik
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten	60,00 %	60,00 %	100,00	Baik Sekali
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,00 %	75,00 %	75,00	Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Standar Kabupaten sebesar **94,83%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **29,00%** pada tahun 2025 terealisasi sebesar **27,50%**. Penyebab tidak tercapainya target kinerja program ini adalah tidak adanya dukungan anggaran untuk pencapaian kinerja. Untuk kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten

pada tahun 2025 lebih banyak untuk kegiatan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala, hal ini dikarenakan untuk pembangunan jalan menjadi jalan standar memerlukan anggaran yang besar serta ketersediaan lahan untuk pelebarannya.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.

Capaian sasaran **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan indikator persentase jalan standar kabupaten didukung dengan dana sebesar Rp. 15.518.651.660,- atau 30,91% dari anggaran sebesar 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan jalan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 94,83%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 55,87%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota sebesar 75,00% Belum mencapai target tahun 2025, dikarenakan perhitungannya sampai dengan triwulan III Tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota didukung dengan dana sebesar Rp. 15.518.651.660,- atau 30,91% dari anggaran sebesar 50.203.888.178,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 7 (tujuh) atau 100% dari rencana sebanyak 7 (tujuh) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan jalan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 75,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 55,87%.

Realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar **48,75%** dari target sebesar **52,82%** dengan realisasi kinerja sebesar **92,29%**. Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah kegiatan tahun 2025 hanya untuk operasional dan pemeliharaan baik itu irigasi maupun saluran air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** dengan indikator persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik didukung dengan dana sebesar Rp. 1.420.061.820,- atau 2,83% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program pengelolaan sumber daya air telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 97,52%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,96%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang dikelola sebesar 100,00% sesuai dengan target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 1.073.804.20,- atau 75,62% dari anggaran program sebesar Rp. 1.420.061.820,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 4 (empat) atau 100% dari rencana sebanyak 4 (empat) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian

output sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,99%.

Rata-rata capaian sasaran **kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang dikelola sebesar 100,00% telah mencapai dari target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 346.164.560,- atau 24,38% dari anggaran program sebesar Rp. 1.420.061.820,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,85%.

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum** dengan indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman didukung dengan dana sebesar Rp. 7.939.653.220,- atau 15,82% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 94,43%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 35,77%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** sebesar 30,00% lebih rendah dari target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. 7.939.653.220,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 7.939.653.220,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 30,00%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 35,77%.

Pencapaian Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan capaian 88,94% dikarenakan pekerjaan sampai dengan triwulan III belum selesai dilaksanakan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan indikator Persentase Jumlah Rumah dengan sistem Pengolahan limbah Domestik didukung dengan dana sebesar Rp. 680.000.000,- atau 1,36% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 88,94%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 14,96%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** sebesar 0,00% lebih rendah dari target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp. 680.000.000,- atau

100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 680.000.000,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** belum dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 0,00%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 14,96%.

Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** dengan indikator Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik didukung dengan dana sebesar Rp. 604.422.041,- atau 1,20% dari anggaran sebesar Rp. 20.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** telah dicapai secara tidak efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 72,79%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 7,16%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** sebesar 0,00% lebih rendah dari target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp. 604.422.041,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 604.422.041,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** belum dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 0,00%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 7,16%.

Program **Penyelenggaraan Penataan Ruang** didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian sasaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator persentase penyelenggaraan penataan ruang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 141.176.820,- atau 0,28% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** belum dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 0,00%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 0,31%.

2.1.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an, efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dianalisis dikarenakan untuk proses pelaksanaan kegiatan masih sedang berlangsung sampai akhir tahun, sementara untuk indikator kinerja dengan dasar Renstra Tahun 2024-2026 penghitungan kinerjanya sampai dengan triwulan III Tahun 2025.

2.1.3. Sasaran Strategis/IKU 3 : Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua dari indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan rencana strategis Tahun 2024-2026 yang merupakan urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berikut target dan realisasi untuk kinerja sasaran pemenuhan infrastruktur permukiman.

Tabel 3.16. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis /IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen 65,54	66,99	102,21	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan PSU Permukiman.

Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut:

2.1.3.1. Pemenuhan PSU Permukiman

Target kinerja pada tahun 2025 untuk indikator pemenuhan PSU Permukiman sebesar 65,54%.

Pada Tahun 2025, indikator pemenuhan PSU permukiman yang terealisasi sebesar 66,99% atau mencapai 102,21% dari target tahun 2025, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.17. Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan PSU Permukiman	65,54	66,99

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 66,99% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan PSU Permukiman = (0,25 x jalan lingkungan) + (0,25 x RTH) + (0,25 x RLH korban bencana) + (0,25 x RLH korban relokasi program pemerintah)

Keterangan :

- Persentase jalan lingkungan = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%;

- b. Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- c. RLH Korban Bencana yaitu terangkainya program terkait dengan RLH korban bencana;
- d. RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Dengan menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan PSU permukiman pada tahun 2025 adalah sebesar 66,99% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,21%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase jalan lingkungan didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

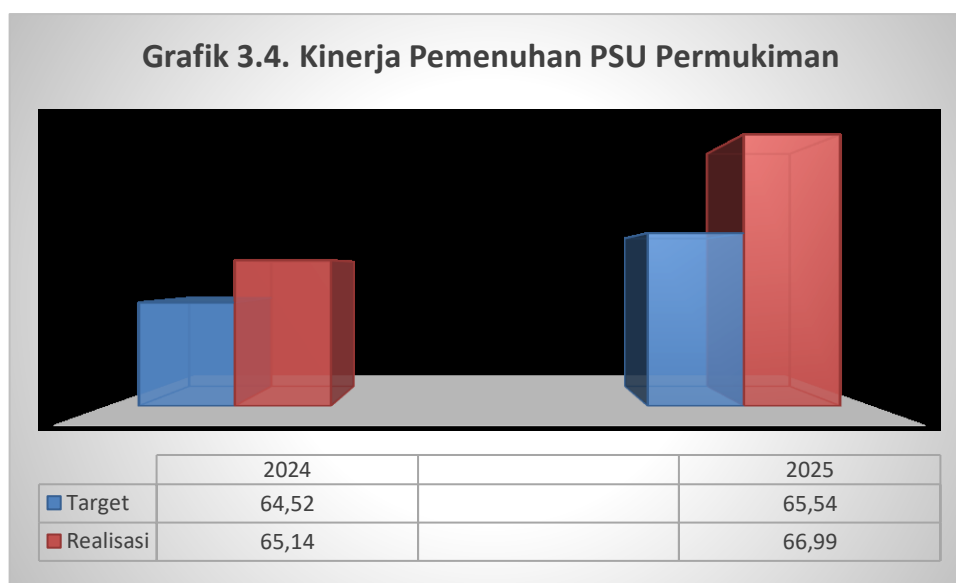
- b. Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- c. RLH Korban Bencana yaitu terangkainya program terkait dengan RLH korban bencana;
- d. RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Perkembangan realisasi capaian untuk nilai pemenuhan infrastruktur permukiman dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 triwulan III adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18. Perkembangan indikator kinerja Sasaran Startegis 3 Tahun 2024-2025

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU permukiman	65,54%	66,99%	65,14%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026



Dari gambar 3.4, pencapaian realisasi target Tahun 2025 adalah sebesar 66,99% dari target yang ditetapkan sebesar 65,54%, yang berarti bahwa target tercapai dan apabila dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini disebabkan indikator yang mendukung pencapaian kinerja pemenuhan infrastruktur permukiman dapat dianggarkan dan dilaksanakan.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU permukiman	66,56%	66,99%	100,65%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target/Standar Provinsi/Nasional/Internasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Provinsi / Nasional/Internasional	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU permukiman	-	66,99%	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- 1) Adanya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program pemerintah seperti program stunting dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta program pengembangan perumahan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun kedua untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 3.21. Target, Realisasi dan Capaian
Program untuk Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,82 %	99,82 %	100,00	Baik Sekali
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	69,84 %	53,01 %	75,90	Baik
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	100,00 %	0,00 %	0,00	Kurang

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Program **Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** mencapai tingkat capaian kinerja 100% sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni.

Capaian sasaran Program **Perumahan dan kawasan Pemukiman Kumuh** didukung dengan anggaran sebesar Rp. 468.133.930,- atau 0,93% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Perumahan dan kawasan Pemukiman Kumuh** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 32,68%.

Program **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 75,30% yaitu dari target sebesar 69,84% yang terealisasi sebesar 52,59%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam

Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Capaian sasaran Program **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** didukung dengan dana sebesar Rp. 6.058.909.678,- atau 12,07% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** telah dicapai secara tidak efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 75,30%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 77,24%.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung sistem pelayanan minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2025 tidak terjadi bencana.

Capaian sasaran Program **Pengembangan Perumahan** didukung dengan dana sebesar Rp. 93.742.500,- atau 0,19% dari anggaran sebesar Rp. 50.203.888.178,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengembangan Perumahan** tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 0,00%, sama dengan capaian penggunaan dana sebesar 0,00%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** sebesar 0% lebih kecil target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp. 93.742.500,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 93.742.500,- dan indikator output

sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

2.1.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman, efisiensi penggunaan sumber daya tidak dapat dianalisis dikarenakan untuk proses pelaksanaan kegiatan masih sedang berlangsung sampai akhir tahun, sementara untuk indikator kinerja dengan dasar Renstra Tahun 2024-2026 penghitungan kinerjanya sampai dengan triwulan III Tahun 2025.

2.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Rencana strategis Tahun 2025-2029

Untuk pencapaian kinerja berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Berikut penjelasan untuk setiap pencapaian setiap sasaran strategis.

2.2.1. Sasaran Strategis/IKU 1 : Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan

Sasaran strategis ini merupakan tujuan dari indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Target dan realisasi kinerja dari sasaran strategis ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.22.

Tabel 3.22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	Persen	44,73%	44,87%	100,31	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Pencapaian sasaran strategis 1 : Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman.

Uraian kinerja atas indikator kinerja Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan sebagai berikut:

2.2.1.1 Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman

Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan berarti bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan, tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Infrastruktur wilayah adalah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, infrastruktur permukiman dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Infrastruktur wilayah mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat.

Target kinerja pada tahun 2025 untuk indikator indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman sebesar 44,73%. Pada Tahun 2025, indikator indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman yang terealisasi sebesar 44,87% atau mencapai 100,31% dari target tahun 2025, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23. Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	44,73%	44,87%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman dengan capaian sebesar 44,87% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman = $(0,8 \times \text{indeks infrastruktur ke-PU-an}) + (0,2 \times \text{indeks infrastruktur permukiman})$.

Perkembangan realisasi capaian untuk nilai indeks infrastruktur ke-PU-an dan permukiman tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ini merupakan indikator baru untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode Tahun 2025-2029.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 serta target Provinsi / Nasional / Internasional.

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	60,32	44,87%	74,39

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target/Standar Provinsi/Nasional/Internasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Provinsi / Nasional/Internasional	Realisasi 2025	%
Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	-	44,87%	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025.
- 2) Melakukan kordinasi dengan OPD lain, PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung serta BPIW Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah terutama untuk infrastruktur ke-PU-an.
- 3) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam penyelesaian kegiatan;
- 2) Adanya pengalokasian anggaran baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAK), dana bahu hasil (DBH SAWIT) untuk mendukung pemerataan infrastruktur terutama untuk mendukung program pemerintah, seperti SPM, Stunting, Pengentasan Kemiskinan;
- 3) Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;
- 4) Adanya koordinasi dengan OPD lain baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi vertikal;

2.2.1.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan Analisa apabila target yang telah ditentukan dapat tercapai. Untuk sasaran strategis Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan, dikarenakan realisasi kinerja melebihi target yaitu dengan capaian 100,31% sehingga dilakukan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

1) Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04, terealisasi sebesar Rp. 52.281.054.018,- menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 8,27% yang berasal dari :

- Pelaksanaan proses pengadaan menghasilkan nilai kontrak di bawah HPS/pagu anggaran, sehingga terjadi sisa anggaran tanpa mengurangi volume dan kualitas output;
- Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian volume atau spesifikasi teknis berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan riil, sehingga biaya dapat ditekan namun target kinerja tetap tercapai;
- Dilakukan pengendalian belanja operasional dan non-prioritas, termasuk efisiensi rapat, serta belanja pendukung lainnya.

2) Efisiensi SDM

Efisiensi anggaran dari segi SDM dicapai melalui optimalisasi penugasan pegawai sesuai kompetensi, pengaturan beban kerja yang lebih efektif, serta pemanfaatan sumber daya internal dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan kegiatan, sehingga kebutuhan belanja pendukung dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan capaian kinerja

Kesimpulannya adalah bahwa untuk kinerja indeks infrastruktur ke-PU-an dan perumahan telah efisiensi dilihat dari target yang telah tercapai serta penggunaan anggaran yang efisien.

Tabel 3.26. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	%	
Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur ke-PU-an dan Permukiman	44,73%	44,87%	100,31	56.992.906.044,04	52.281.054.018	91,73	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

2.2.2 Sasaran Strategis/IKU 2 : Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

Sasaran staregis ini merupakan sasaran dari indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berikut disampaikan target dan realisasi untuk kinerja indeks infrastruktur ke-PU-an pada Tahun 2025.

Tabel 3.27. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	Persen	41,96%	42,03%	100,17	Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Pencapaian sasaran strategis 2 : Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks infrastruktur ke-PU-an. Uraian kinerja atas indikator kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut:

2.2.2.1 Indeks Infrastruktur ke-PU-an

Indeks infrastruktur ke-PU-an dengan target kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 41,96%. Pada Tahun 2025, nilai indeks infrastruktur ke-PU-an yang terealisasi sebesar 42,03% atau mencapai 100,17% dari target perubahan Tahun 2025, dengan ringkasan sebagaimana tersaji pada Tabel 3.19.

Tabel 3.28. Realisasi Indeks Infrastruktur ke-PU-an Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Indeks infrastruktur ke-PU-an	41,96%	42,03%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan capaian sebesar 42,03% diperoleh dari rumus berikut:

Indeks Infrastruktur ke-PU-an = $(0,3 \times \text{Tingkat kemantapan jalan kabupaten}) + (0,2 \times \text{sumber daya air terkelola dengan baik}) + (0,3 \times \text{terkelolanya keciptakaryaan dengan baik}) + (0,1 \times \text{penataan ruang}) + (0,1 \times \text{jasa konstruksi})$

Keterangan :

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = $(\text{Panjang jalan mantap kabupaten} / \text{Panjang jalan kabupaten}) \times 100\%$

Keterangan:

- a. Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang.
- b. Panjang jalan kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten yang sudah dilegalisasikan.

2. Sumber daya air terkelola dengan baik = $(0,5 \times \text{saluran irigasi yang berfungsi dengan baik}) + (0,5 \times \text{saluran drainase sekunder dalam kondisi baik})$

Keterangan:

- a. Saluran irigasi yang berfungsi dengan baik = $(\text{Panjang Saluran Irigasi yang berfungsi baik sampai tahun } n / \text{Panjang Saluran Irigasi Wewenang Kabupaten}) \times 100\%$.
- b. Saluran drainase sekunder dalam kondisi baik = $(\text{Panjang saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sampai tahun } n / \text{Panjang saluran Drainase Sekunder wewenang Kabupaten}) \times 100\%$

3. Terkelolanya keciptakaryaan dengan baik = $(0,4 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman}) + (0,2 \times \text{rumah tangga})$

bersanitasi) + (0,2 x drainase kondisi baik) + (0,2 x persetujuan bangunan gedung)

Keterangan :

- a. Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman = $(\text{Jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman} / \text{Jumlah rumah tangga}) \times 100\%$.
 - b. Rumah bersanitasi = $(\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani system pengolahan air limbah yang aman (sanitasi)} / \text{jumlah rumah tangga}) \times 100\%$.
 - c. Drainase kondisi baik = $(\text{Panjang drainase lingkungan yang berfungsi dengan baik} / \text{panjang drainase lingkungan keseluruhan}) \times 100\%$
 - d. Persetujuan bangunan Gedung = $(\text{Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/PBG dan SLF)} / \text{Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung}) \times 100\%$
4. Penataan ruang = (0,5 x Kesesuaian tata ruang) + (0,5 x Penyelenggaraan penataan ruang)

Keterangan

- a. Kesesuaian Tata Ruang = $(\text{Luas Pola Ruang Kab. Belitung yang sesuai} / \text{Luas Total Pola Ruang Kab Belitung}) \times 100\%$.
 - b. Penyelenggaraan Penataan Ruang = $(20\% \times \text{Perencanaan Tata ruang}) + (30\% \times \text{Pengaturan Tata Ruang}) + (20\% \times \text{Pemanfaatan Ruang}) + (30\% \times \text{Pembinaan Ruang})$.
5. Jasa Konstruksi = (0,4 x Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi) + (0,6 x layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten)

Keterangan :

- a. Tenaga Kerja Konstruksi yang Tersertifikat = $(\text{jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat sampai tahun } n / \text{total jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat yang direncanakan}) \times 100\%$.
- b. Layanan Jasa Konstruksi = $(35\% \text{ Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala} + 10\% \text{ Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala}) + (10\% \text{ Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala}) + (10\% \text{ Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya}) + (10\% \text{ Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala}) + (15\% \text{ Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material})$

konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan) + (10% Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota)

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator indeks infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2025 adalah sebesar **42,03%**. Tingkat capaian kinerja sebesar **100,17%**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tingkat kemantapan jalan didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan Matap kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{613,99}{696,96} \times 100\%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar **88,10%** dengan perhitungan Panjang jalan kabupaten yang mantap (kondisi baik dan sedang) sepanjang **613,99 km** dibagi dengan Panjang jalan kabupaten sesuai dengan SK yaitu **696,96 km**.

b. Sumber daya air terkelola dengan baik didapat dengan menggunakan rumus
 $(0,5 \times \text{Persentase saluran drainase sekunder dalam kondisi baik}) + (0,5 \times \text{Persentase saluran irigasi yang berfungsi dengan baik})$
 $= (0,5 \times 13,07\%) + (0,5 \times 10,08\%)$
 $= 23,15\%$

c. Terkelolanya keciptakarya dengan baik dengan rumus
 $= (0,4 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman})$
 $+ (0,2 \times \text{rumah tangga bersanitasi}) + (0,2 \times \text{drainase kondisi baik}) + (0,2 \times \text{persetujuan bangunan gedung})$

1) Rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum yang aman didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sampai tahun n}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100\%$$

$$\frac{8.981}{54.418} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar **16,50%** dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar **8.91 rumah tangga** dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu **54.418 rumah tangga**. Untuk jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung berdasarkan data dari BKKBN Tahun 2024.

- 2) Rumah tangga bersanitasi didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAL} \\ \text{yang aman sampai tahun n} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung} \end{array}} \times 100 \%$$

$$\frac{1.286}{54.418} \times 100 \%$$

Realisasi rumah tangga bersnitasi yaitu rumah tanggga dengan sanitasi aman adalah sebesar **2,36%** dengan perhitungan jumlah rumah tangga yang terlayani SPAL yang aman sebanyak **1.286 rumah tangga** dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu **54.418 rumah tangga**.

- 3) Drainase kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik} \\ \text{sampai tahun n} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{total panjang drainase lingkungan} \end{array}} \times 100 \%$$

$$\frac{72.594}{245.333} \times 100 \%$$

Realisasi drainase dalam kondisi baik adalah sebesar **29,59%** dengan perhitungan panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik sampai Tahun 2025 sepanjang **72.594 meter** dengan Panjang drainase lingkungan di Kabupaten Belitung sepanjang **245.333 meter**.

4) Persetujuan bangunan Gedung dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat (IMB/PBG dan SLF) sampai tahun n}}{\text{Jumlah bangunan gedung di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{2,182}{53.667} \times 100 \%$$

Realisasi persetujuan gedung adalah sebesar **4,07%** dengan perhitungan bangunan gedung yang memiliki IMB/PBG dan SLF sampai Tahun 2025 sebanyak **2.182 unit** dengan bangunan Gedung di Kabupaten Belitung sebanyak 53.667 unit.

d. Penataan ruang dengan rumus

$$= (0,5 \times \text{Kesesuaian tata ruang}) + (0,5 \times \text{Penyelenggaraan penataan ruang})$$

1) Kesesuaian tata ruang didapat dengan rumus :

$$\frac{\text{Luas pola ruang Kabupaten Belitung yang sesuai}}{\text{Luas total pola ruang Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

$$\frac{228.974}{229.369} \times 100 \%$$

Realisasi kesesuaian tata ruang adalah sebesar **99,83%** dengan perhitungan luas pola ruang yang sesuai sebanyak **228.974 Ha** dengan total pola ruang Kabupaten Belitung sebanyak 229.369 Ha.

2) Penyelenggaraan penataan ruang didapat dengan rumus :

$$= 20\% \text{ Perencanaan Tata Ruang} + 30\% \text{ Pengaturan Tata Ruang} + 20\% \text{ Pemanfaatan Ruang} + 30\% \text{ Pembinaan Ruang}$$

Realisasi penyelenggaraan penataan ruang adalah sebesar **40,74%**.

e. Jasa Konstruksi didapat dengan menggunakan rumus :

= (0,4 x Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi) + (0,6 x layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten)

1) Tenaga Kerja Konstruksi yang tersertifikasi didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sampai tahun n}}{\text{total jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi yang direncanakan}} \times 100 \%$$
$$\frac{111}{450} \times 100 \%$$

Realisasi tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi dalah sebesar **24,67%** dengan perhitungan tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasai sampai tahun 2025 sebanyak **111 orang** dengan total jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang direncanakan sebanyak 450 orang.

2) Layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten didapat dari

= (35% Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala + 10% Data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + 10% Data Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang terupdate secara berkala *) + 10% Potensi Pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya + 10% Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala + 15% Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 bulan + 10% Profil Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota).

Perkembangan indikator sasaran strategi untuk meningkatnya infrastruktur ke-PU-an tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan yang cukup signifikan baik itu dari kosakatanya maupun dari definisi operasionalnya. Indikator ini merupakan indikator tahun pertama dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode Tahun 2025-2029.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	54,94%	42,03%	76,50%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Tabel 3.30. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target/Standar Provinsi/Nasional/Internasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Provinsi / Nasional/Internasional	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	-	42,03%	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025.
- 2) Melakukan kordinasi dengan OPD lain, PUPR Provinsi Kep. Bangka Belitung serta BPIW Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah terutama untuk infrastruktur ke-PU-an.
- 3) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam penyelesaian kegiatan;
- 2) Adanya pengalokasian anggaran baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAK), dana bagi hasil (DBH Sawit) untuk mendukung pemerataan infrastruktur terutama untuk mendukung program pemerintah, seperti SPM, Stunting, Pengentasan Kemiskinan;

- 3) Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;
- 4) Adanya koordinasi dengan OPD lain baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi vertikal;

Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an didukung dengan pelaksanaan 8 (delapan) program utama yaitu program pengelolaan sumber daya air, program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan gedung, program pengembangan jasa konstruksi dan program penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2025-2029 sehingga tidak bias dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.31. Target, Realisasi dan Capaian
Program untuk Mendukung Sasaran Strategis Indeks Infrastruktur ke-PU-an

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik	22,15 %	23,15 %	104,53	Baik Sekali
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	16,56 %	16,50 %	99,65	Baik Sekali
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik yang Aman	2,36 %	2,36 %	100,00	Baik Sekali
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	29,59 %	29,59 %	100,00	Baik Sekali

5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar	4,00 %	4,07 %	101,65	Baik Sekali
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	86,66 %	88,10 %	101,66	Baik Sekali
7	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase Layanan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten	100,00 %	100,00 %	100,00	Baik Sekali
		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Tersertifikasi	16,67 %	24,67 %	147,97	Baik Sekali
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	51,82 %	40,74 %	78,62	Baik
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	100,00 %	99,83 %	99,83	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar **23,15%** dari target sebesar **22,15%** dengan realisasi kinerja sebesar **104,53%**. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Sumber Daya Air** dengan indikator persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik didukung dengan dana sebesar Rp. 1.781.050.615,- atau 3,13% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program pengelolaan sumber daya air telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output

program sebesar 104,53%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,86%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase saluran drainase sekunder dalam kondisi baik sebesar 13,07% melebihi dengan target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 1.434.886.055,- atau 80,56% dari anggaran program sebesar Rp. 1.781.050.615,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 4 (empat) atau 100% dari rencana sebanyak 4 (empat) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 104,90%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,86%.

Rata-rata capaian sasaran **kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator persentase saluran irigasi yang berfungsi dengan baik sebesar 10,08% melebihi target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 346.164.560,- atau 19,44% dari anggaran program sebesar Rp. 1.781.050.615,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 104,03%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,85%.



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota





Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang **911 Sambungan Rumah** (SR) selama tahun 2025.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum** dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman didukung dengan dana sebesar Rp. 7.982.335.020,- atau 14,01% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04 dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 99,65%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 95,54%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** sebesar 96,81% lebih rendah dari target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah**

Kabupaten/ Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 7.982.335.020,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 7.982.335.020,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 96,81%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 95,54%.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota



Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN. Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2025.

Tabel 3.32. Jumlah Pelanggan Aktif
UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan
1	PAM Juru Seberang	96
2	PAM Sijuk	339
3	PAM IKK Membalong	162
4	PAM Desa Bantan	240
5	PAM IKK Badau	288
8	Air Kemasan/Galon	102
9	SPAM Kws. Tanjung batu	316
10	SPAM IKK Selat Nasik	354
	Jumlah	1.903

Sumber : UPT PAM DPUPR Kab. Belitung, 2026



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan UPT PAM

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan capaian 100,00%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat.

Capaian sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Sistem Pengolahan Limbah Domestik yang Aman didukung dengan dana sebesar Rp.645.000.000,- atau 1,13% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) output kegiatan dan 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,35%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** sebesar 100,00% sama dengan target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp. 645.000.000,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 645.000.000,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,35%.





Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem darinase perkotaan serta sub kegiatan pembangunan sistem darinase lingkungan. Pada Tahun 2025 panjang drainase yang sudah dibangun adalah sepanjang 739 meter.

Capaian sasaran Program **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** dengan indikator Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik didukung dengan dana sebesar Rp. 558.502.041,- atau 0,98% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) output kegiatan dan 2 (dua) output sub kegiatan. Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** telah dicapai sebesar 99,73%.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,73%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota** sebesar 100,00% sama dengan target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang**

Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan dana sebesar Rp. Rp. 558.502.041,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 558.502.041,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,73%.



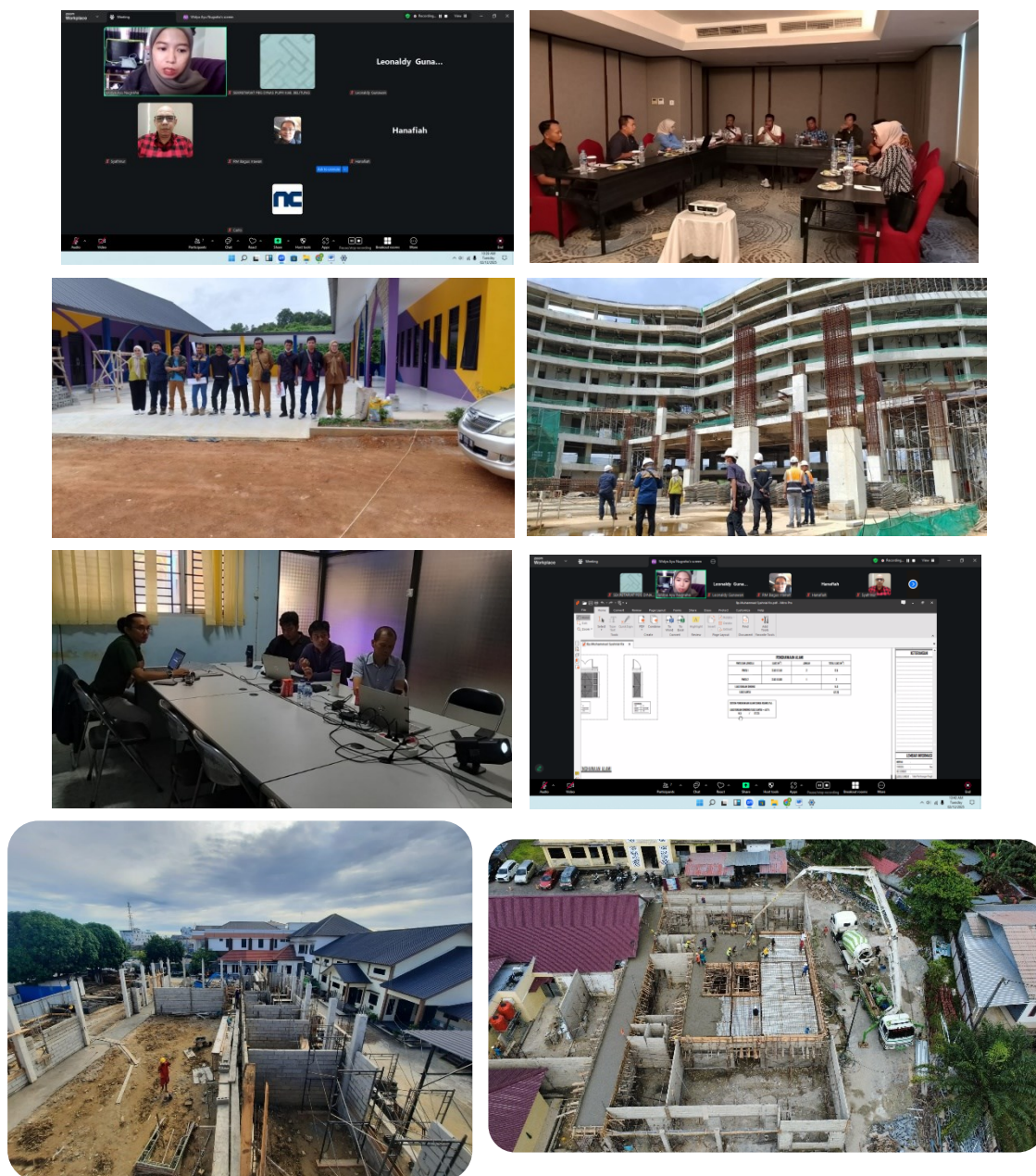
Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program **Penataan Bangunan Gedung** mencapai tingkat kinerja sebesar 101,65% yaitu dari target yang direncanakan sebesar 4,00% terealisasi sebesar 4,07%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu penyelenggaraan bangunan Gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung serta 3(tiga) sub kegiatan. Pada tahun 2025, bangunan Gedung yang dikeluarkan IMB/PBG dan SLF yaitu sebanyak 135 unit.

Capaian sasaran Program **Penataan Bangunan Gedung** dengan indikator Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar didukung dengan dana sebesar Rp. 7.979.122.300,- atau 14,00% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) output kegiatan dan 3 (tiga) output sub kegiatan. Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran **Program Penataan Bangunan Gedung** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 101,65%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 85,81%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** sebesar 135,00% melebihi target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** didukung dengan dana sebesar Rp. Rp. 7.979.122.300,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 7.979.122.300,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 3 (tiga) atau 100% dari rencana sebanyak 3 (tiga) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja Kegiatan **Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output kegiatan sebesar 135,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 85,81%.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Program **Penyelenggaraan Jalan** mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar **101,66%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **86,66%** pada tahun 2025 terealisasi sebesar **88,10%**. Penyebab tercapainya target kinerja program ini adalah adanya dukungan anggaran untuk pencapaian kinerja terutama anggaran dari pusat melalui dana DBH Sawit. Untuk kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten pada tahun 2025 lebih banyak untuk kegiatan pemeliharaan baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala.

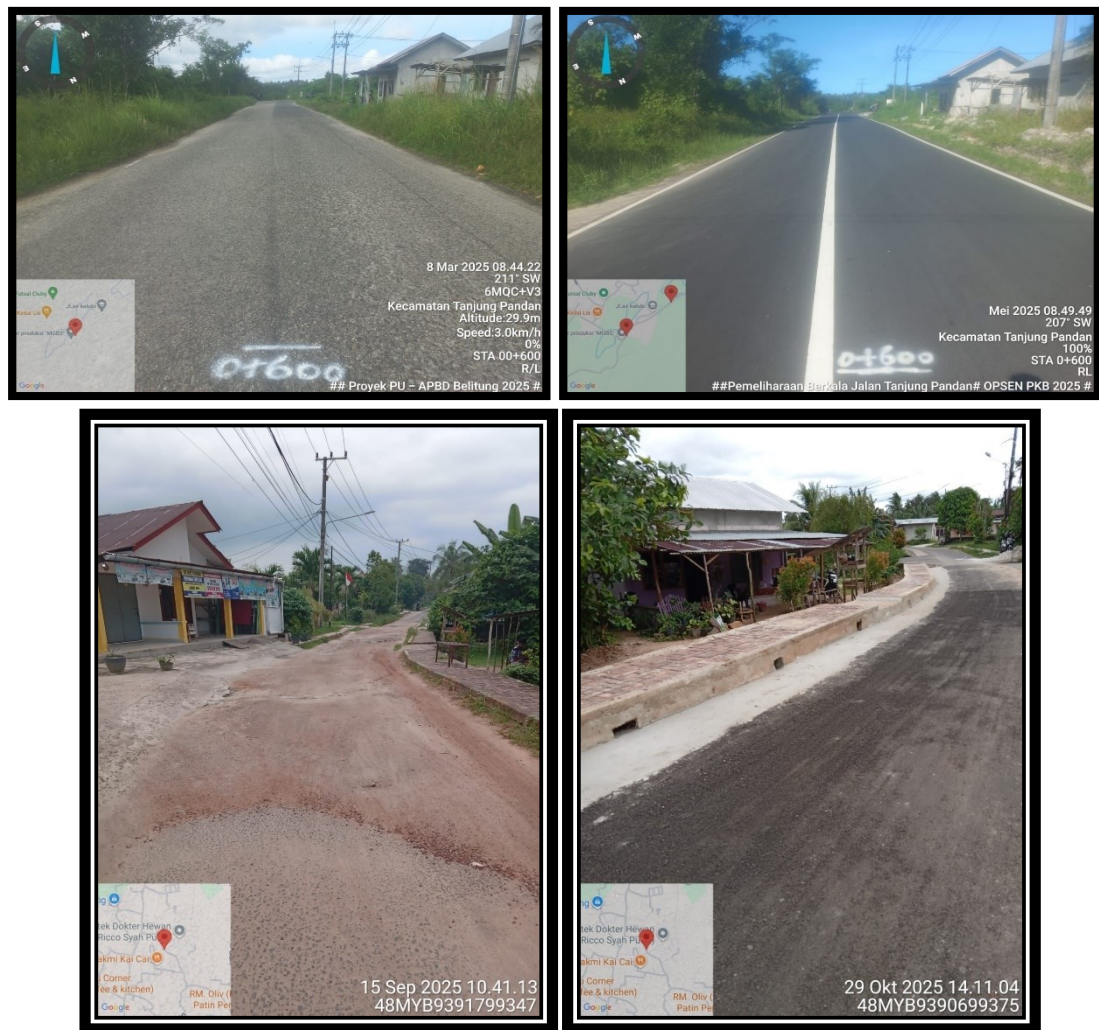
Capaian sasaran **Program Penyelenggaraan Jalan** dengan indikator persentase kemandapan jalan kabupaten didukung dengan dana sebesar Rp. 18.604.651.660,- atau 32,64% dari anggaran sebesar 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan jalan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 101,66%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 93,94%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** dengan indikator Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang sepanjang 613,99 Km telah melebihi target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota didukung dengan dana sebesar Rp. 18.604.651.660,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar 18.604.651.660,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 7 (tujuh) atau 100% dari rencana sebanyak 7 (tujuh) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran kegiatan terlaksananya penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 101,66%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 93,94%.





Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Program **Penyelenggaraan Penataan Ruang** mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar **92,59%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **75,91%** pada tahun 2025 terealisasi sebesar **70,29%**. Penyebab tidak tercapainya target kinerja program ini adalah keterbatasan anggaran sehingga untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program tidak teranggarkan seperti perencanaan penyusunan RDTR, perkara terkait dengan RTRW yang belum selesai dan lain-lain.

Capaian sasaran **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator persentase kesesuaian tata ruang dan peresnetase penyelenggaraan penataan ruang didukung dengan dana sebesar Rp. 88.985.680,- atau 0,16% dari anggaran sebesar 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang belum dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 92,59%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,89%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** dengan indikator jumlah dokumen tata ruang sebanyak 2 dokumen telah mencapai target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 48.985.680,- atau 55,05% dari anggaran program sebesar Rp. 88.895.680,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,80%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebanyak 1 dokumen telah mencapai target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 40.000.000,- atau 44,95% dari anggaran program sebesar Rp. 88.895.680,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 100,00%.



Gambar 3.9 Dokumentasi Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program **Pengembangan Jasa Konstruksi** mencapai tingkat capaian kinerja sebesar **104,80%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **66,67%** pada tahun 2025 terealisasi sebesar **69,87%**. Penyebab tercapainya target kinerja program ini adalah adanya kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pelatihan konstruksi sehingga tenaga kerja yang tersertifikasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran **Program Pengembangan Jasa Konstruksi** dengan indikator persentase tenaga konstruksi yang tersertifikasi dan persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten didukung dengan dana sebesar Rp. 155.124.163,- atau 0,27% dari anggaran sebesar 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 2 (dua) atau 100% dari rencana sebanyak 2 (dua) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja program pengembangan jasa konstruksi telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 104,80%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 98,14%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** dengan indikator jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi sebanyak 35 orang telah mencapai target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi didukung dengan dana sebesar Rp. 42.632.903,- atau 18,46% dari anggaran program sebesar Rp. 155.124.163,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 91,99%.

Rata-rata capaian sasaran Kegiatan **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi** dengan indikator jumlah laporan hasil pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi sebanyak 1 laporan telah mencapai target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi didukung dengan dana sebesar Rp. 126.491.260,- atau 81,54% dari anggaran program sebesar Rp. 155.124.163,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,54%.



Gambar 3.10 Dokumentasi Pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi

2.2.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan analisa apabila target yang telah ditentukan dapat tercapai. Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an, dikarenakan realisasi kinerja melebihi target yaitu dengan capaian 100,17% sehingga dilakukan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

1) Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran untuk indikator kinerja indeks infrastruktur ke-PU-an sebesar Rp. 48.296.663.592,04, terealisasi sebesar Rp. 43.867.435.937,- menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 9,17% yang berasal dari :

- Pelaksanaan proses pengadaan menghasilkan nilai kontrak di bawah HPS/pagu anggaran, sehingga terjadi sisa anggaran tanpa mengurangi volume dan kualitas output;



- Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian volume atau spesifikasi teknis berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan riil, sehingga biaya dapat ditekan namun target kinerja tetap tercapai;
- Dilakukan pengendalian belanja operasional dan non-prioritas, termasuk efisiensi rapat, serta belanja pendukung lainnya.

2) Efisiensi SDM

Efisiensi anggaran dari segi SDM dicapai melalui optimalisasi penugasan pegawai sesuai kompetensi, pengaturan beban kerja yang lebih efektif, serta pemanfaatan sumber daya internal dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan kegiatan, sehingga kebutuhan belanja pendukung dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan capaian kinerja

Kesimpulannya adalah bahwa untuk kinerja indeks infrastruktur ke-PU-an telah efisiensi dilihat dari target yang telah tercapai serta penggunaan anggaran yang efisien.

Tabel 3.33. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	41,96%	42,03%	100,17	48.296.663.592,04	43.867.435.937	90,83	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

2.2.3 Sasaran Strategis/IKU 3 : Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

Sasaran strategis ini merupakan sasaran kedua dari indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan rencana strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berikut target dan realisasi untuk kinerja sasaran pemenuhan infrastruktur permukiman.

Tabel 3.34. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis /IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis / IKU	Satuan Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen 55,85	56,26	100,73	Baik Sekali

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman. Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur Permukiman sebagai berikut:

2.2.3.1 Indeks Infrastruktur Permukiman

Target kinerja pada tahun 2025 untuk indikator indeks infrastruktur permukiman sebesar 55,85%.

Pada Tahun 2025, indikator Indeks infrastruktur permukiman yang terealisasi sebesar 56,26% atau mencapai 100,73% dari target tahun 2025, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.35. Realisasi Indeks Infrastruktur Permukiman Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Indeks Infrastruktur Permukiman	55,85%	56,26%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 56,26% diperoleh dari rumus berikut:

Indeks Infrastruktur Permukiman = $(0,4 \times \text{jalan lingkungan}) + (0,3 \times \text{RTH}) + (0,1 \times \text{RTLH}) + (0,05 \times \text{RLH korban bencana}) + (0,05 \times \text{RLH bagi korban relokasi program pemerintah}) + (0,1 \times \text{pengurangan kawasan kumuh})$

Keterangan :

- a. Persentase jalan lingkungan = (Panjang jalan lingkungan kondisi baik sampai tahun n / total Panjang jalan lingkungan) x 100%;
- b. RTH = (Luas taman yang dikelola / total luas taman keseluruhan) x 100%;
- c. RLH Korban Bencana yaitu RLH bagi korban bencana yang teranggarkan dana tau terlaksana;
- d. RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu RLH yang teranggarkan dana tau terlaksana;
- e. Pengurangan kawasan kumuh = (luas Kawasan kumuh yang tertangani sampai tahun n / total luas Kawasan kumuh) x 100%.

Dengan menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan PSU permukiman pada tahun 2025 adalah sebesar 56,26% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,73%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan kondisi baik sampai tahun n}}{\text{total Panjang jalan lingkungan}} \times 100 \%$$
$$\frac{20,70 \text{ Km}}{40,50 \text{ Km}} \times 100 \%$$

Realisasi jalan lingkungan dalam kondisi baik dalah sebesar **51,10%** dengan perhitungan jalan lingkungan dalam kondisi baik sampai tahun 2025 sepanjang 20,70 Km dengan total jalan lingkungan sepanjang 40,50 Km.

- b. Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan rumus

$$\frac{\text{Luas taman yang dikelola}}{\text{total luas taman keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$\frac{13.370,37 \text{ m}^2}{13.370,37 \text{ m}^2} \times 100 \%$$

Realisasi ruang terbuka hijau yang dikelola adalah sebesar **100,00%**, hal ini disebabkan bahwa luas RTH yang ditangani sesuai dengan surat keputusan.

- c. RLH Korban Bencana yaitu yaitu RLH bagi korban bencana yang bertanggung dana tau terlaksana;

Realisasi RLH korban bencana adalah 100,00% karena selalu dianggarkan sebagai SPM, sehingga harus dianggarkan tiap tahun walaupun tidak dapat dilaksanakan.

- d. RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu RLH yang bertanggung dana tau terlaksana;

Realisasi RLH korban relokasi program pemerintah untuk tahun 2025 adalah 0,00% karena tidak dianggarkan untuk tahun 2025, dikarenakan untuk target tahun 2025 menggunakan dokumen anggaran yang sudah ada yaitu anggaran tahun 2025.

- e. Pengurangan Kawasan kumuh berdasarkan rumus

$$\frac{\text{luas Kawasan kumuh yang tertangani sampai tahun n}}{\text{total luas Kawasan kumuh}} \times 100 \%$$

$$\frac{0,86 \text{ Ha}}{19,63 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

Realisasi pengurangan Kawasan kumuh untuk Tahun 2025 adalah sebesar **4,38%**.

Perkembangan indikator sasaran strategi untuk meningkatnya infrastruktur permukiman tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbedaan yang cukup signifikan dari definisi operasionalnya. Indikator ini merupakan indikator tahun pertama dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Periode Tahun 2025-2029.

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	81,84%	56,26%	68,74%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target/Standar Provinsi/Nasional/Internasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Provinsi / Nasional/Internasional	Realisasi 2025	%
Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	-	56,26%	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2025, dimana untuk anggaran perubahan adanya penambahan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian kinerja.
- 2) Melakukan kordinasi dengan OPD lain terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah terutama untuk infrastruktur ke-PU-an.
- 3) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain :

- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam penyelesaian kegiatan;
- 2) Adanya pengalokasian anggaran baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat, dimana adanya penambahan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja pada anggaran perubahan;
- 3) Sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing sehingga kegiatan dapat dilaksnakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat;

- 4) Adanya koordinasi dengan OPD lain baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi vertikal;

Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) program yaitu program pengembangan perumahan, Program Kawasan Permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.38. Target, Realisasi dan Capaian
Program untuk Sasaran Strategis Indeks Infrastruktur Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	100,00	%	0,00	%	0,00	Kurang
		Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	0,00	%	0,00	%	0,00	Kurang
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	2,55	%	4,38	%	171,76	Baik Sekali
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	3,85	%	3,85	%	100,00	Baik Sekali
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	69,84	%	53,01	%	75,90	Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung Sistem Pelayanan Minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2025 tidak terjadi bencana. Dikarenakan merupakan SPM sehingga harus selalu dianggarkan setiap tahun.

Capaian sasaran **Program Pengembangan Perumahan** dengan indikator persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana serta bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah didukung dengan dana sebesar Rp. 93.472.500,- atau 0,16% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program pengembangan perumahan Belum dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 0,00%, sama dengan capaian penggunaan dana sebesar 0,00%.

Pencapaian **Program Kawasan permukiman** mencapai tingkat kinerja sebesar 171,76% yaitu dari target yang direncanakan sebesar 2,55% terealisasi sebesar 4,38%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Tingginya capaian kinerja program ini adalah dikarenakan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh program lain yang mendukung terhadap indikator program yaitu pengurangan luasan Kawasan kumuh yang masuk dalam perhitungan sesuai dengan berita acara.

Capaian sasaran **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh didukung dengan dana sebesar Rp. 75.494.601,- atau 0,13% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program pengembangan perumahan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 171,76%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 77,67%.

Rata-rata capaian kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan indikator jumlah dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh sebanyak 1 dokumen telah mencapai target tahun 2025. Capaian kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha didukung dengan dana sebesar Rp. 75.494.601,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 75.494.601,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 77,67%.

Program **Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** mencapai tingkat capaian kinerja 100% sama dengan target tahun 2025 sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota yaitu perbaikan rumah tidak layak huni.

Capaian sasaran **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** dengan indikator Persentase rumah layak huni didukung dengan dana sebesar Rp. 468.133.930,- atau 0,82% dari anggaran sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja sasaran program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,72%.

Rata-rata capaian kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase rumah layak huni sebanyak 6 unit rumah layak huni telah mencapai target tahun 2025. Capaian kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan dana sebesar Rp. 468.133.930,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp.

468.133.930,- dan indikator output sub kegiatan sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output program sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 99,72%.



Gambar 3.11 Dokumentasi Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 75,09% yaitu dari target sebesar 69,84% yang terealisasi sebesar 53,01%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Capaian sasaran **Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** dengan indikator persentase PSU yang dikelola didukung dengan dana sebesar

Rp. 8.059.141.421,- atau 14,14% dari anggaran sebesar 56.992.906.044,04,- dan indikator output kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Belum dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 75,09%, lebih kecil dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,88%.

Rata-rata capaian sasaran **Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** dengan indikator persentase penanganan PSU 100% telah mencapai target tahun 2025. Capaian sasaran kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan didukung dengan dana sebesar Rp. 8.059.141.421,- atau 100,00% dari anggaran program sebesar Rp. 8.059.141.421,- dan indikator output sub kegiatan (IOK) sebanyak 1 (satu) atau 100% dari rencana sebanyak 1 (satu) output sub kegiatan.

Dari sisi penggunaan dana, realisasi kinerja kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan telah dicapai secara efisien. Hal ini dilihat dari capaian output sebesar 100,00%, lebih besar dari pada capaian penggunaan dana sebesar 97,88%.

Untuk komponen indikator kinerja utama untuk sasaran meningkatnya infrastruktur permukiman yaitu jalan lingkungan serta ruang terbuka hijau (RTH) untuk pelaksanaan kegiatannya masuk ke dalam program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Tabel 3.39. Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI		KET
		PANJANG (M)	LEBAR (M)	
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal 2025)	326,0	3,0	ASPAL
	a) Jalan Keluarga	326,0	3,0	
2.	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal 2025)	510,0	3,0	ASPAL
	a) Jalan Jerat Nangka	230,0	3,0	
	b) Jalan Paska Panen	280,0	3,0	
3.	Pembangunan Jalan Perumahan Perumnas (Dana Insentif Fiskal 2025)	368,0	3,0 s.d 4,0	ASPAL

	a) Jalan Garuda	240,0	3,0 s.d 4,0	
	b) Jalan Nuri	128,0	3,5	
4.	Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Paket II) (Sisa Insentif Fiskal 2022)	556,0	2,75 s.d 3,0	ASPAL
	a) Jalan Perahu	444,0	2,75 s.d 3,0	
	b) Jalan Mualim II Dalam	112,0	3,0	
5.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Desa Aik Rayak (Dana Insentif Fiskal 2025)	143,0	2,5	COR BETON + BURAS
	a) Ruas 1	62,0	2,5	
	b) Ruas 2	81,0	2,5	
6.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Pangkallalang (Dana Insentif Fiskal 2025)	272,1	1,5 s.d 2,0	COR BETON + BURAS
	a) Jalan Gang Sebelah Honda Sudirman			
		272,1	1,5 s.d 2,0	
7.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Tanjungpendam (Sisa Insentif Fiskal 2022)	292,0	1,2 s.d 2,5	COR BETON
	a) Jalan Gang Kaswandi	107,0	1,2 s.d 2,5	
	b) Jalan Gang Sebelah Masjid Al-Fattah	185,0	1,2	
8.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan (Dana Insentif Fiskal 2025)	3.085,0	0,5 s.d 1,0	COR BETON
	a) Jalan Mualim Jaya 1, Desa Aik Pelempang Jaya	537,0	0,5 s.d 1,0	Bahu Jalan
	b) Jalan Bidara, Kelurahan Pangkallalang	290,0	0,5 s.d 1,0	Bahu Jalan
	c) Jalan Komplek PU, Desa Perawas	220,0	0,5 s.d 1,0	Bahu Jalan
	d) Jalan Marzuki, Desa Aik Rayak	563,0	0,0	Tebasan
	e) Gg. Belida, Desa Aik Rayak	269,0	0,0	Tebasan
	f) Jalan Jagung, Desa Air Merbau	726,0	0,0	Tebasan
	g) Jalan Nelayan, Desa Terong	196,0	0,0	Tebasan
	h) Jalan Aset, Desa Terong	259,0	0,0	Tebasan
	i) Jalan Komplek Perumnas, Desa Aik Pelempang Jaya	5,0	0,0	Perbaikan Drainase
	j) Jalan Aik Kulong, Kelurahan Parit	20,0	0,0	Tebasan
9.	Pembangunan Jalan Karya Bakti Kecamatan membalong	2.987,0	3,0 s.d 4,0	Tanah Puru (Timbunan Pilihan)
10.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket I)	266,0	2,5 s.d 3,0	ABT
	a) Jalan Setapak Pak Tahau RT 34 RW 10	201,0	2,5	COR BETON
	b) Jalan Setapak Bunga Desa	65,0	3,0	
11.	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket II)	190,0	1,5 s.d 2,8	ABT
	a) Jalan Setapak Gatot Subroto Dalam, Kel. Paal Satu	190,0	1,5 s.d 2,8	COR BETON
12.	Peningkatan Jalan Lingkungan Handayani / P2IP (Lanjutan)	120,0	4,0	ABT
	a) Jalan Handayani P2IP/Haryani	120,0	4,0	COR BETON

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026



Gambar 3.12 Dokumentasi Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2.2.3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan analisa apabila target yang telah ditentukan dapat tercapai. Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman, dikarenakan realisasi kinerja melebihi target yaitu dengan capaian 100,73% sehingga dilakukan Analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

1) Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran untuk indikator kinerja indeks infrastruktur permukiman sebesar Rp. 8.696.242.452,- terealisasi sebesar Rp. 8.413.618.081,- menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,25% yang berasal dari :

- Pelaksanaan proses pengadaan menghasilkan nilai kontrak di bawah HPS/pagu anggaran, sehingga terjadi sisa anggaran tanpa mengurangi volume dan kualitas output;

- Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian volume atau spesifikasi teknis berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan riil, sehingga biaya dapat ditekan namun target kinerja tetap tercapai;

2) Efisiensi SDM

Efisiensi anggaran dari segi SDM dicapai melalui optimalisasi penugasan pegawai sesuai kompetensi, pengaturan beban kerja yang lebih efektif, serta pemanfaatan sumber daya internal dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan kegiatan, sehingga kebutuhan belanja pendukung dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan capaian kinerja.

Kesimpulannya adalah bahwa untuk kinerja indeks infrastruktur permukiman telah efisiensi dilihat dari target yang telah tercapai serta penggunaan anggaran yang efisien.

Tabel 3.40. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman	55,85%	56,26%	100,73	8.696.242.452	8.413.618.081	90,83	Efisien

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

B. Kinerja Lainnya Tahun 2025

1. Kinerja Lainnya

Kinerja lainnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 adalah aplikasi SUGAK (Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite) yang telah direplikasi oleh Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung. Untuk replikasi Aplikasi SUGAK ini sudah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2025.

Selain telah direplikasi oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur, Aplikasi SUGAK juga sudah menjadi Merek tersendiri, dimana sudah terdaftar

di Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai perlindungan hak atas merek SUGAK.

Aplikasi SUGAK ini merupakan inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang telah dikembangkan dari Tahun 2024. Aplikasi ini untuk mendukung kinerja dari UPT PAM dalam pengelolaan air minum yang mempunyai jangkauan sampai ke desa-desa di Kabupaten Belitung sehingga memudahkan dalam pengawasan pengelolaan air minum.

2. Penghargaan / Apresiasi Instansi Lain

Pada Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung memperoleh penghargaan/apresiasi dari Pemerintah Daerah yaitu dalam kategori kearsipan, dimana mendapatkan penghargaan dari Bupati Belitung yang memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan internal Kabupaten Belitung Tahun 2025 dengan kategori BB atau Sangat Baik.



Gambar 3.13 Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Kearsipan

Selain di bidang kearsipan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga untuk Tahun 2025 mendapat penghargaan/Apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI yaitu pada program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program GENTING bertujuan untuk mempercepat penurunan stunting melalui pendampingan dan bantuan langsung kepada keluarga stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan baduta (bayi dua tahun). Program GENTING mengedepankan kolaborasi lintas sector (pentahelix) dalam memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga beresiko stunting.



Gambar 3.14 Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Program GENTING

3. Perbaikan SAKIP Tahun 2024

Kinerja lainnya pada tahun 2025 adalah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung nomor 700.1.2.1/166/RLKin/INSPEK/2025 tanggal 26 September 2025. Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,55 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik.

Nilai yang diperoleh pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Nilai yang diperoleh pada tahun 2023. Untuk Evaluasi AKIP lebih menitikberatkan pada implementasi AKIP secara mandiri sebelum dinilai oleh evaluator yaitu Inspektorat Kabupaten Belitung dengan disertai dengan *evidence* untuk mendukung penilaian AKIP.

Tabel 3.41 Perbandingan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP

No.	Komponen	Hasil Evaluasi Tahun 2023			Hasil Evaluasi Tahun 2024		
		Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	69,00%	20,70	30,00	72,00%	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	61,00%	18,30	30,00	72,00%	21,60
3	PElaporan Kinerja	15,00	75,00%	11,25	15,00	69,00%	10,35
4	Evaluasi Internal	25,00	69,00%	17,25	25,00	72,00%	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	100,00	67,50%	67,50	71,55%	71,55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				B			BB

Sumber : LHP Evaluasi AKIP Inspektorat, 2025

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati Belitung untuk memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Menyempurnakan Pohon kinerja dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja dan menjabarkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- 2) Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada Website Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

b. Pengukuran Kinerja

- ii. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja dengan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran berdasarkan faktor penghambat yang menggambarkan permasalahan yang terjadi atas kegagalan pencapaian target kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dengan mengungkapkan informasi yang memadai terkait analisa dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah, Informasi efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang sesuai dengan ketentuan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Dalam hal tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Akan menyempurnakan Pohon kinerja dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja dan menjabarkan pada Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara

keseluruhan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sudah menyusun baik itu perjanjian kinerja mulai dari eselon II sampai dengan fungsional/pelaksana, *cascading*, pohon kinerja.

- 2) Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada Website Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten sudah mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website resmi.
- b. Pengukuran Kinerja
 - 1) Akan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja dengan penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran berdasarkan faktor penghambat yang menggambarkan permasalahan yang terjadi atas kegagalan pencapaian target kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja
 - 1) Akan meningkatkan kualitas Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dengan mengungkapkan informasi yang memadai terkait analisa dan evaluasi realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah, Informasi efesiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang sesuai dengan ketentuan.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - 1) Akan menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP sehingga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar Rp. 56.992.906.044,04,- atau terserap sebesar 91,73% dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar 90,55%. Berikut adalah akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 yang dibagi kedalam beberapa kategori.

1. Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.42. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran IKU

No.	Sasaran Startegis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Tersedianya Layanan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan	56.992.906.044	52.281.054.018	91,73
2	Meningkatnya infrastruktur ke-PU-an	48.296.663.592	43.867.435.937	90,83
3	Meningkatnya infrastruktur Permukiman	8.696.242.452	8.413.618.081	96,75

Dilihat dari Tabel 3.41, sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman menempati urutan teratas dari capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar **96,34%**, sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang merupakan sasaran tertinggi kedua dengan realisasi kinerja sebesar **90,55%**, sedangkan sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an menempati urutan terendah dari realisasi anggaran yaitu **89,94%**. Dari segi anggaran, sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an mempunyai anggaran sebesar yaitu 60,04 Milyar atau sebesar **90,42%** dari total anggaran Dinas PUPR Kabupaten Belitung, hal ini disebabkan semua program yang menjadi urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masuk ke dalam sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an termasuk program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota.

2. Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.981.892.113	8.538.854.346	85,54
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.781.050.615	1.778.569.850	99,86
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.982.335.020	7.626.526.412	95,54
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	645.000.000	640.792.500	99,65



5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	558.502.041	556.992.000	99,76
6	Program Penataan Bangunan Gedung	7.979.122.300	6.846.939.850	85,81
7	Program Penyelenggaraan Jalan	18.604.651.660,04	17.477.746.337	93,94
8	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	155.124.163	152.245.542	98,14
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	88.985.680	88.888.000	99,89
10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	520.000.000	159.881.100	30,75
11	Program Pengembangan Perumahan	93.472.500	0	0
12	Program Kawasan Permukiman	75.494.601	58.634.567	77,67
13	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	468.133.930	466.839.000	99,72
14	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.059.141.421	7.888.144.514	97,88
JUMLAH		56.992.906.044,04	56.992.906.044,04	91,73

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Jika dilihat berdasarkan anggaran per program adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki capaian anggaran paling tinggi yaitu sebesar 99,89%, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan capaian sebesar 99,86% serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase capaian anggaran sebesar 99,76%. Sementara untuk capaian anggaran terendah adalah Program Pengembangan Perumahan yaitu sebesar 0,00%, yang disebabkan untuk program tersebut merupakan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang harus selalu dianggarkan walaupun kondisi bencana alam di Kabupaten Belitung tidak ada. Untuk serapan anggaran berikutnya yang rendah adalah Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan capaian sebesar 30,75%, hal ini disebabkan bahwa program dimaksud baru dianggarkan pada Perubahan Anggaran serta tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 3.44 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2025
Menurut Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.781.050.615		
I.	Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.434.886.055	1.432.913.850	99,86
1	Sub Kegiatan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	166.111.750	165.827.000	99,83
2		Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai	1.066.984.960	1.065.620.000	99,87
3		Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS kewenangan Kabupaten/Kota	54.159.345	53.966.850	99,64
4		Pembangunan Tanggul Sungai	147.630.000	147.500.000	99,91
II.	Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	346.164.560	345.656.000	99,85
1	Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	185.704.400	185.406.000	99,84
2		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	160.460.160	160.250.000	99,87
B	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.982.335.020	7.626.526.412	95,54
I	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.982.335.020	7.626.526.412	95,54
1	Sub Kegiatan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.883.051.514	5.550.893.559	94,35
2		Operasi dan pemeliharaan SPAM	2.099.283.506	2.075.632.853	98,87
C	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	645.000.000	640.792.500	99,35
I.	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	645.000.000	640.792.500	99,35
1	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000	48.027.500	96,06
2		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	595.000.000	592.765.000	99,62
D.	Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	558.502.041	556.992.000	99,73
I.	Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	558.502.041	556.992.000	99,73
1	Sub Kegiatan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	196.960.000	196.425.000	99,73
2		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	361.542.041	360.567.000	99,73
E	Program	Penataan Bangunan Gedung	7.979.122.300	6.846.939.850	85,81
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	7.979.122.300	6.846.939.850	85,81
1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),	377.222.950	361.919.850	95,94



No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
2		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.845.413.350	3.002.556.000	78,08
3		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.756.486.000	3.482.464.000	92,71
F.	Program	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	520.000.000	159.881.100	30,75
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000	159.881.100	30,75
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000	159.881.100	30,75
G.	Program	Penyelenggaraan Jalan	18.604.651.660	17.477.746.337	99,79
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	18.604.651.660	17.477.746.337	99,79
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	98.790.000	98,79
2		Pengelolaan leger jalan	50.106.600	33.672.200	67,20
3		Pemeliharaan berkala jalan	10.488.585.387	9.423.749.411	89,85
4		Pemeliharaan rutin jalan	5.703.959.673	5.687.471.000	99,71
5		Pembangunan jembatan	500.000.000	491.325.000	98,27
6		Pemeliharaan rutin jembatan	200.000.000	199.817.000	99,91
7		Pembangunan Jalan	1.562.000.000	1.542.921.726	98,78
H.	Program	Pengembangan Jasa Kontruksi	155.124.163	152.245.542	98,14
I.	Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	28.632.903	152.245.542	98,14
1	Sub Kegiatan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	28.632.903	26.340.500	91,99
II.	Kegiatan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	126.491.260	125.905.042	99,54
1	Sub Kegiatan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	126.491.260	125.905.042	99,54
I.	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	88.985.680	88.888.000	99,89
I.	Kegiatan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	48.985.680	48.888.000	99,80
1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	48.000.000	48.000.000	100,00
2	Sub Kegiatan	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	985.680	888.000	90,09
III.	Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00
1	Sub kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	40.000.000	40.000.000	100,00
J.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.981.892.113	8.538.854.346	85,54



No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.241.084	4.519.285	54,84
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.821.285	3.764.900	78,09
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.419.799	754.385	22,06
II.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.844.060.422	7.483.609.545	84,62
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.844.060.422	7.483.609.545	84,62
III.	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.300.000	45.952.300	93,21
1	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.300.000	45.952.300	93,21
IV.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.038.877	476.858.756	96,91
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.549.225	3.543.120	99,83
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.724.079	83.957.461	97,94
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.322.893	6.259.290	98,99
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140.843.500	138.902.000	98,62
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.156.480	22.574.217	74,86
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.567.200	7.080.000	67,00
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.875.500	214.542.668	99,85
V.	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.635.030	1.631.700	99,80
1	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.635.030	1.631.700	99,80
VI.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.965.700	314.978.870	93,75
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.652.900	2.390.000	90,09
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.100.000	143.089.420	91,67
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.500.000	26.500.000	100,00
4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.712.800	142.999.450	94,88
VII.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.651.000	211.30.3890	84,36
1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.243.000	43.808.600	55,28
2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.293.000	70.343.850	95,98
3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.615.000	44.826.440	98,27
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.500.000	52.325.000	99,67
K.	Program	Pengembangan Perumahan	93.472.500	0	0
I	Kegiatan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	93.472.500	0	0
1		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	93.472.500	0	0
L.	Program	Kawasan Permukiman	75.494.601	58.634.567	77,97



No.	Uraian		Keuangan (Rupiah)		Capain (%)
			Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I	Kegiatan	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	75.494.601	58.634.567	77,97
1	Sub Kegiatan	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	75.494.601	58.634.567	77,97
M.	Program	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	468.133.930	466.839.000	99,72
I	Kegiatan	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	468.133.930	466.839.000	99,72
1	Sub Kegiatan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	468.133.930	466.839.000	99,72
N.	Program	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.059.141.421	7.888.144.514	97,88
I	Kegiatan	Penyelenggaraan PSU Perumahan	8.059.141.421	7.888.144.514	97,88
2	Sub Kegiatan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.059.141.421	7.888.144.514	97,88
		TOTAL	56.992.906.044	52.281.054.018	91,73

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

3. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun Sebelumnya

Jika membandingkan anggaran dan realisasi dengan tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	116,605,874,560	105,205,777,442	90,22%
2022	134,428,892,858	118,821,710,473	88,39%
2023	111.060.728.318	93.944.293.134	84,59%
2024	73.827.217.328	66.852.550.674	90,55%
2025	56.992.906.044,04	52.281.054.018	91,73%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Dari **Tabel 3.45**, dapat dilihat bahwa total realisasi anggaran selama tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebesar **91,73 %** dari total anggaran yang direncanakan yaitu Rp **56.992.906.044,04**, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Melalui LPSE baik untuk pengadaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun pengadaan barang, sehingga baik yang melalui proses pelelangan umum maupun pengadaan langsung dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan tekendalinya waktu pengadaan.
2. Harga kontrak yang lebih rendah dari pagu anggaran menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.
3. Sistem pelaporan online melalui aplikasi (sipelempang, emonev) membantu proses pengendalian anggaran.
4. Adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk pencapaian kinerja OPD.

Adapun faktor penghambat adalah:

Kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung yang kurang. Jumlah SDM dengan jumlah program dan kegiatan tidak berbanding lurus sehingga satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan dengan tanggung jawab diluar tugas dan fungsinya. Jika melihat pada **Tabel 3.46** Jumlah seluruh sumber daya manusia (ASN) pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah 48 (empat puluh delapan) orang sedangkan jumlah sub kegiatan sebanyak 61 Sub kegiatan. Jumlah ini membuat setiap orang yang harus menanggung beban yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini belum termasuk tugas pokok yang harus dikerjakan oleh ASN sehari-hari. Paket kegiatan yang ada di dinas PUPR sebagian besar merupakan pengadaan jasa konstruksi dengan beban kerja yang cukup berat. Dibutuhkan skill/kemampuan sebagai pemimpin dalam manajemen proyek/konstruksi karena dalam pelaksanaan setiap jasa konstruksi memerlukan seorang Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka dinas PUPR Kabupaten Belitung mengambil beberapa solusi antara lain; memanfaatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara sesuai bidangnya. Kebijakan yang diambil dengan mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikasi PBJ. Selanjutnya di beberapa kegiatan konstruksi berskala besar, bidang mengambil kebijakan untuk menambah tenaga pendukung dari luar kantor. Kebijakan ini untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai spesifikasi masing-masing.

Tabel. 3.46. Kinerja Sumber Daya Manusia

No	Unit Kerja	Jumlah SDM	Pejabat Eselon	Fungsional	PPPK	Jumlah Program	Jumlah Sub Kegiatan
1	Sekretariat	13	3	8	2	1	20
2	Bidang Sumber Daya Air	6	1	5	-	1	4
3	Bidang Bina Marga	4	1	3	-	1	7
4	Bidang Cipta Karya	6	1	4	1	5	9
5	Bidang Perumahan dan Permukiman	7	1	6	-	4	4
6	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	8	1	5	2	2	4
7	UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium	4	2	2	-	0	1
8	UPT Pengelolaan Air Minum	2	2	0	-	0	1
	Jumlah	50	12	33	5	13	52

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

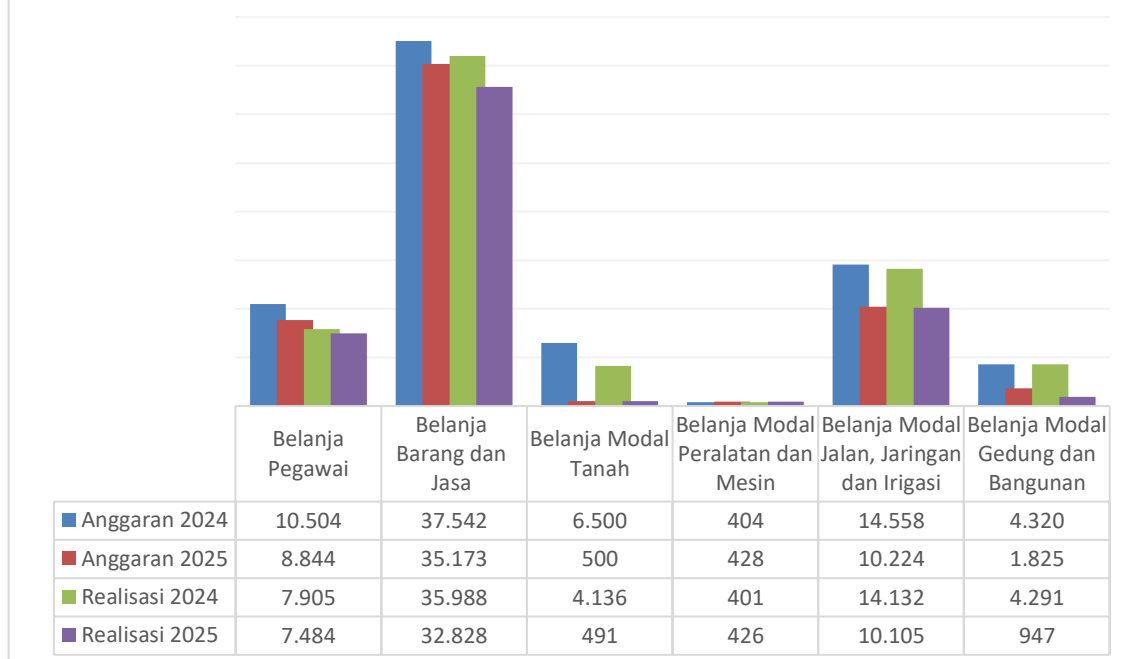
Tabel 3.47. Perbandingan Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian	2024			2025		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH						
1	BELANJA OPERASIONAL	48.045.551.442	43.892.507.594	91,36	44.016.727.969,04	40.311.667.758	91,58
1	Belanja Pegawai	10.503.518.978	7.904.719.934	75,26	8.844.060.422	7.483.609.545	84,62
2	Belanja Barang dan Jasa	37.542.032.464	35.987.787.660	95,86	35.172.667.547,04	32.828.058.213	93,33
2	BELANJA MODAL	25.781.665.886	22.960.043.080	89,06	12.976.178.075	11.969.386.260	92,24
1	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000	4.135.660.290	63,63	500.000.000	491.325.000	98,27
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	403.957.000	400.923.000	99,25	427.528.000	426.184.500	99,69
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	14.557.708.886	14.132.338.790	97,08	10.224.150.075	10.105.173.560	98,84
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.320.000.000	4.291.121.000	99,33	1.824.500.000	946.703.200	51,89
	Jumlah Belanja	73.827.217.328	66.852.550.674	90,55	56.992.906.044,04	52.281.054.018	91,73

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026



Grafik 3.5 Realisasi Anggaran Dinas PUPR Kab. Belitung



Total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024, akan tetapi untuk pencapaian kinerja dilihat dari sisi anggaran mengalami kenaikan.

4. Realisasi Pendapatan

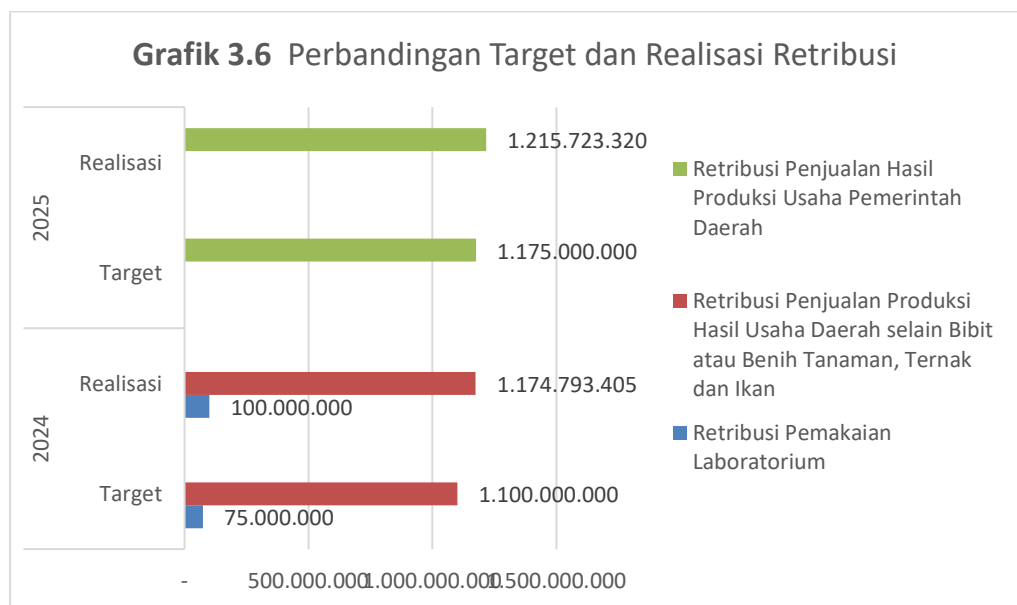
Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung digolongkan sebagai retribusi daerah yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yaitu Retribusi Penjualan Hasil Usaha UPT PAM dan Retribusi Jasa Laboratorium UPT SPPL.

Berikut realisasi retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Tabel 3.48 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas PUPR Kabupaten Belitung

No	Jenis Retribusi	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	75.000.000	100.000.000	133,33	-	-	-
3	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	1.100.000.000	1.174.793.405	106,80	-	-	-
4	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	-	-	-	1.175.000.000	1.215.723.320	103,47
Total		1.175.000.000	1.274.793.405	108,49	1.175.000.000	1.215.723.320	103,47

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026



Tahun 2025, jenis retribusi yang dipangku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjadi satu jenis apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) jenis retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung naik sebanyak 3,47% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,86%, yang disebabkan adanya penurunan pelanggan aktif, banyaknya pelanggan yang tidak

dapat ditagih, jumlah tamu hotel yang menurun serta kondisi cuaca yang musim hujan.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan retribusi pada Tahun 2025 adalah:

1. Berlakunya sistem aplikasi SUGAK (Sistem Utilitas Pengelolaan Air Kite) dalam pencatatan meteran, pembukuan secara online.
2. Jumlah pemohon untuk pengujian laboratorium bertambah baik dari rekanan atau penyedia Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, pihak swasta ataupun masyarakat umum yang mengajukan permohonan beberapa pengujian.
3. Pengujian laboratorium dimasukkan dalam persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2025

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun transisi antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Penyusunan laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung secara umum telah berjalan **baik** dan menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan pekerjaan umum serta di bidang perumahan dan Kawasan permukiman.

Sebagian besar sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah mencapai target yang ditetapkan, terutama pada program pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, sumber daya air, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan public serta perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini mencerminkan adanya komitmen organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan secara terencana dan terukur.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas perencanaan teknis. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja masih perlu ditingkatkan agar hasil pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi kinerja ini akan dijadikan bahan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian

program dan kegiatan pada tahun berikutnya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
2. Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya;
3. Melakukan reviu dan penyelarasan perencanaan program dan kegiatan terhadap IKU;
4. Meningkatkan pengendalian internal dan pengawasan dalam penyusunan laporan kinerja;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga lebih berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Perlu adanya bimbingan teknis/diklat oleh OPD yang mengampu dalam penyusunan Laporan Kinerja.